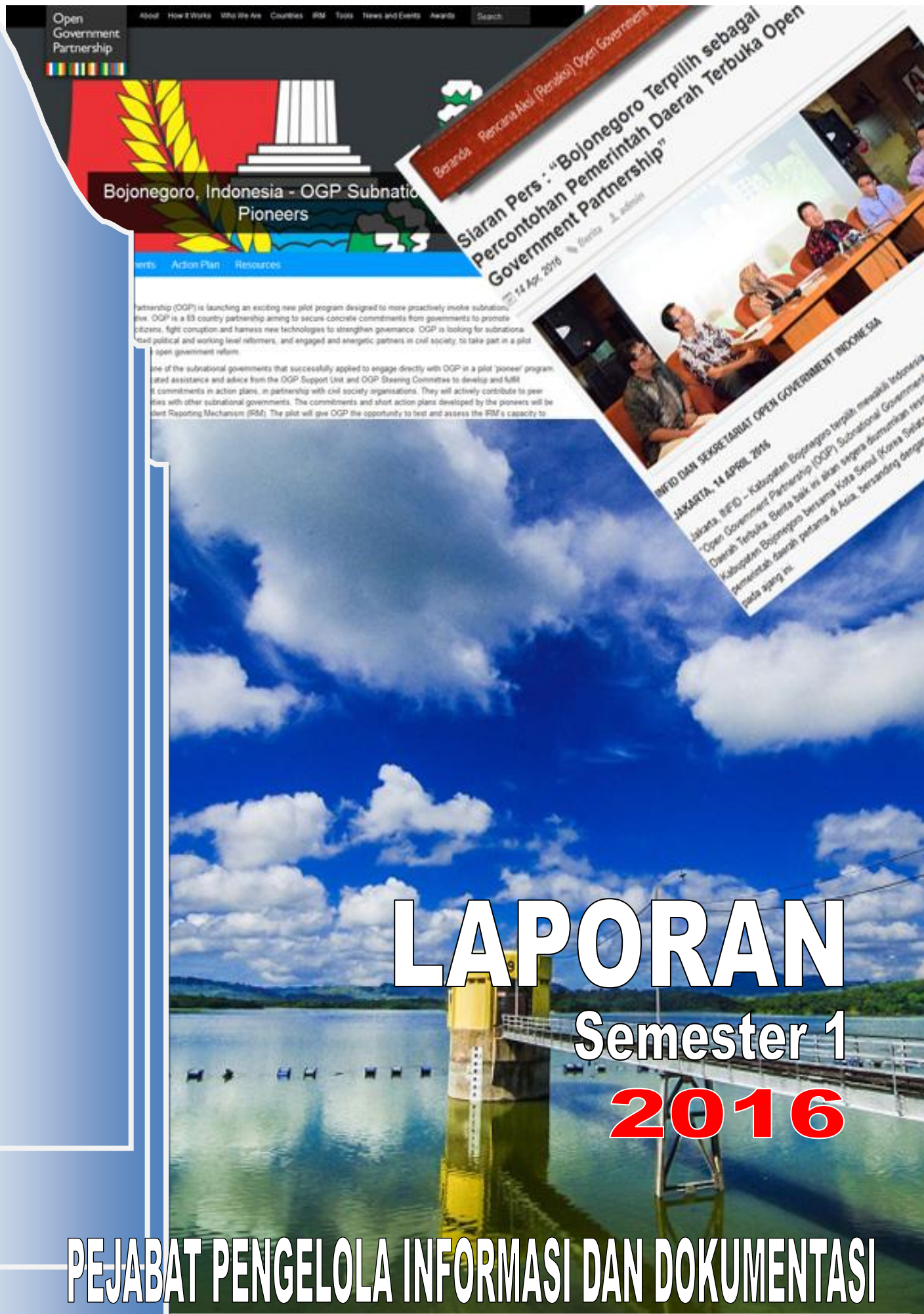




Open
Government
Partnership

About How It Works What We Are Countries IRM Tools News and Events Awards Search

Bojonegoro, Indonesia - OGP Subnational
Pioneers

Events Action Plan Resources

Partnership (OGP) is launching an exciting new pilot program designed to more proactively involve subnational governments. OGP is a 65 country partnership aiming to secure concrete commitments from governments to promote citizens, fight corruption and harness new technologies to strengthen governance. OGP is looking for subnational governments, political and working level reformers, and engaged and energetic partners in civil society to take part in a pilot program to test and assess the IRM's capacity to

one of the subnational governments that successfully applied to engage directly with OGP in a pilot 'pioneer' program. They will receive assistance and advice from the OGP Support Unit and OGP Steering Committee to develop and fulfill their commitments in action plans, in partnership with civil society organisations. They will actively contribute to peer reviews with other subnational governments. The commitments and short action plans developed by the pioneers will be reported through the Reporting Mechanism (IRM). The pilot will give OGP the opportunity to test and assess the IRM's capacity to

Bojonegoro, Indonesia - OGP Subnational
Pioneers

Siaran Pers : "Bojonegoro Terpilih sebagai
Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka Open
Government Partnership"

14 Apr 2016

INFO DAN SEKRETARIAT OPEN GOVERNMENT INDONESIA
JAKARTA, 14 APRIL 2016

Jakarta, 14 April 2016 - Kabupaten Bojonegoro terpilih mewakili Indonesia sebagai "Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pioneer". Kabupaten Bojonegoro bersama Kota Seoul (Korea Selatan) dan pemerintah daerah pertama di Asia, bersanding dengan

LAPORAN

Semester 1

2016

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

KATA PENGANTAR

Puji syukur terpanjatkan kehadirat Allah SWT, karena telah diberikan kekuatan untuk mengemban tugas dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Bojonegoro, dan telah terselesaikannya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2016 semester 1. Keterbukaan informasi sangat penting dalam kehidupan negara demokrasi. Dengan keterbukaan akan terbangun kepercayaan. Kepercayaan yang tinggi antara rakyat dengan Badan Publik, akan mendorong terwujudnya pemerintahan yang kredibilitasnya terakui.

Pemerintah Bojonegoro, mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Terkait dengan keterbukaan, telah banyak hal yang diimplementasikan, antara lain adalah dilakukannya kegiatan “**sobo pendopo**” yang dikemas dalam acara Dialog Interaktif, yakni dialog antara penyelenggara pemerintahan dengan masyarakatnya. Pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan mulai 14 Maret 2008 sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dibawah kepemimpinan **Kang Yoto-Kang Hartono**. Keterbukaan pemerintahan yang dilakukan oleh Kabupaten Bojonegoro telah memberikan inspirasi para penulis, salah satunya adalah *Otto Scharmer* dalam buku **Leading from the Emerging Future: From Ego-System to Eco-System Economics** (by C. Otto Scharmer and Katrin Kaufer, 2013) dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika Serikat.

Ditahun 2016 ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam hal keterbukaan informasi memperoleh beberapa pengakuan dari Lembaga yang peduli KIP baik di tingkat nasional maupun international. Yaitu di awal 2016 Seknas Open Government Indonesia (OGI) mengajukan 3 (tiga) kota, Kota Banda Aceh, DKI Jakarta dan Kabupaten Bojonegoro sebagai pilot project Open Government Indonesia untuk mengikuti kompetisi Open Government di tingkat dunia yang diselenggarakan oleh Open Government Patnership (OGP) yang beranggotakan 65 negara. Di ajang ini Kabupaten Bojonegoro terpilih menjadi percontohan Pemerintahan terbuka/ OGP bersama 15 Negara di Dunia antara lain Seoul (Korea Selatan), Paris (Perancis), Buenos aires (Argentina), San Paulo (Brazil), Tbilisi (Goergia), dan lain-lain.

Keterbukaan pemerintahan dalam prosesnya tidak akan pernah berhenti, oleh karena itu, kami menyadari dalam Laporan Tahunan yang menggambarkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bojonegoro, masih memerlukan berbagai masukan demi mengapai hal yang lebih baik. Untuk itu mohon dapatnya memberikan masukan yang konstruktif.

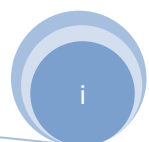
Demikian semoga yang disajikan dalam pelaporan ini dapat bermanfaat bagi Kabupaten Bojonegoro dan daerah lain untuk dapat saling belajar. Sekian terimakasih. SALAM KETERBUKAAN.....

Bojonegoro, 31 Desember 2015
Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Bojonegoro
Ketua,

KUSNANDAKA TJATUR P.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670224 198602 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
Sekilas Bojonegoro	1
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bojonegoro	6
1. Regulasi Pelayanan Informasi	6
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten dan SKPD	10
Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	14
1. Sarana dan Prasarana	15
2. Anggaran PPID	24
3. Daftar Informasi Publik	25
4. Permohonan Informasi Publik dan Penyelesaiannya	29
5. Sengketa Informasi Publik	37
Kendala dan Pengembangan	38
1. Kendala	38
2. Pengembangan/ Inovasi	39
3. Rencana Tindak/ Target Tahun 2016	42
Dokumen	46
Link Pemberitaan on-line	50

..... Keterbukaan akan membangun Kepercayaan

**..... Merubah dari Pemerintahan EGO,, ke ECO adalah
kunci Keterbukaan**

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Penggunaan Lahan di Bojonegoro	1
Gambar	2	Pertumbuhan Ekonomi Bojonegoro	3
Gambar	3	Wilayah Kabupaten Bojonegoro	5
Gambar	4	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro	10
Gambar	5	Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bojonegoro	12
Gambar	6	Desk Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Kabupaten Bojonegoro	16
Gambar	7	Sarana Penunjang Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi PPID Kabupaten Bojonegoro	17
Gambar	8	Desk Layanan PPID SKPD Badan PKKD	18
Gambar	9	Desk Layanan PPID Dialog Publik	19
Gambar	10	Desk Layanan PPID Bulan Layanan Publik	19
Gambar	11	Desk Layanan LAPOR!	21
Gambar	12	Publikasi Layanan Informasi	22
Gambar	13	Sistem Integrasi Aspirasi Pengaduan-Layanan Aspirasi Pengaduan On-line Rakyat (SIAP_LAPOR!)	23
Gambar	14	Kerjasama Layanan Permohonan Informasi	24
Gambar	15	Layanan informasi DIP pada Web PPID	28
Gambar	16	Layanan Permohonan Informasi melalui LAPOR!	31
Gambar	17	Laju Tindak Lanjut Layanan Informasi Melalui LAPOR!..	32
Gambar	18	Topik Permohonan Informasi dan SKPD Terlapor Melalui LAPOR!	33
Gambar	19	Grafik Permohonan Informasi melalui Radio Malowopati ...	31
Gambar	20	Grafik Permohonan Informasi melalui Dialog Publik ...	34
Gambar	21	MOU Bupati Bojonegoro dengan NGO BI dan Sinergantara..	39

DAFTAR TABEL

Tabel	1	Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra Dinas Kominfo	7
Tabel	2	Data PPID Kabupaten , SKPD dan BUMD	12
Tabel	3	Data DIP PPID Kabupaten, SKPD, BUMD, Badan Publik Lain	26
Tabel	4	Data Layanan Informasi Langsung Melalui Desk	29
Tabel	5	Rincian Pelayanan Informasi pada Desk layanan Permohonan Informasi	30

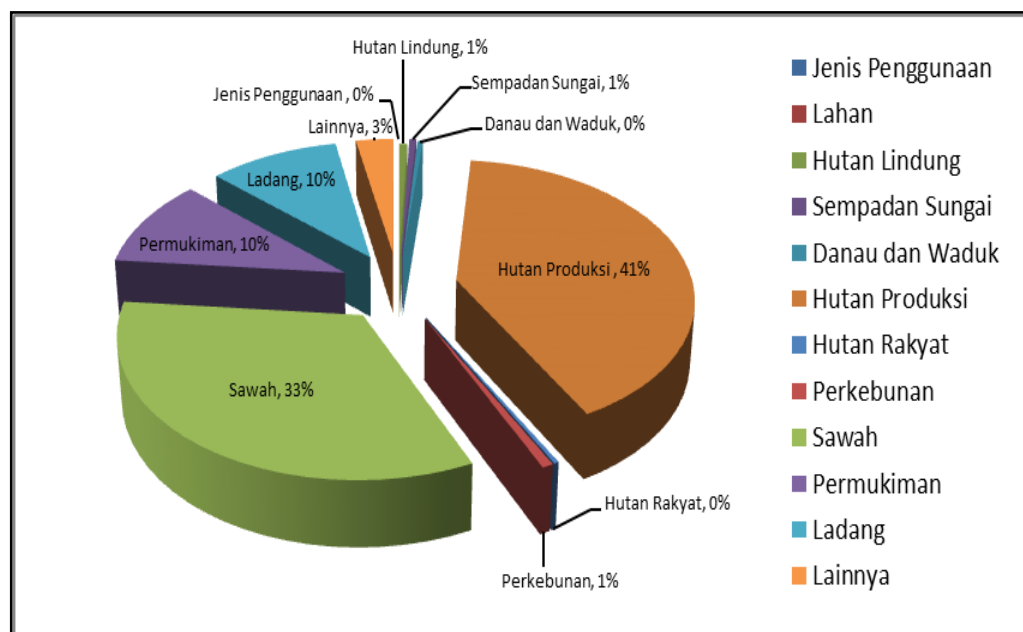
Sekilas Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro memiliki luas wilayah yaitu mencapai 230.706 Ha, dimana 40,15% wilayah Bojonegoro merupakan wilayah hutan Negara yang sebagian besar berada di wilayah Selatan Bojonegoro, 32,58% berikutnya berupa lahan sawah yang sebagian besar berada di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Sebanyak 22,42% merupakan tanah kering dan sisanya 4,85% adalah perkebunan dan lain-lain. Wilayah kabupaten Bojonegoro memiliki batas,

Sebelah Utara : Kabupaten Tuban
 Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan;
 Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang;
 Sebelah Barat : Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah).

Secara administratif terbagi dalam 28 kecamatan, 419 desa dan 11 kelurahan.

Gambar 1
Penggunaan Lahan di Bojonegoro



Secara Geografis, Kabupaten Bojonegoro dilalui oleh sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo yang mengalir dari selatan, menjadi batas alam dari Provinsi Jawa Tengah, kemudian mengalir ke arah timur, di sepanjang wilayah utara Kabupaten Bojonegoro melewati 15 wilayah Kecamatan. Bagian utara merupakan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo yang cukup subur dengan pertanian yang ekstensif. Kawasan pertanian umumnya ditanami padi pada musim penghujan, dan tembakau pada musim kemarau. Bagian selatan adalah pegunungan kapur, bagian dari rangkaian Pegunungan Kendeng. Bagian barat laut (berbatasan dengan Jawa Tengah) adalah bagian dari rangkaian Pegunungan Kapur Utara.

Kabupaten Bojonegoro, juga sebagai daerah rawan bencana, yakni banjir sungai Bengawan Solo, banjir bandang di wilayah selatan, banjir genangan air dalam kota. Bencana lainnya adalah tanah longsor, hal ini terjadi karena sebagian besar pohon-pohon penahan tangkis kemiringan tanah banyak yang sudah tertebang disamping adanya percepatan hutan gundul. Angin kencang/puting beliung, kebakaran dan kekeringan juga merupakan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, informasi serta merta sangat dibutuhkan oleh masyarakat terkait *early warning* kejadian bencana tersebut.

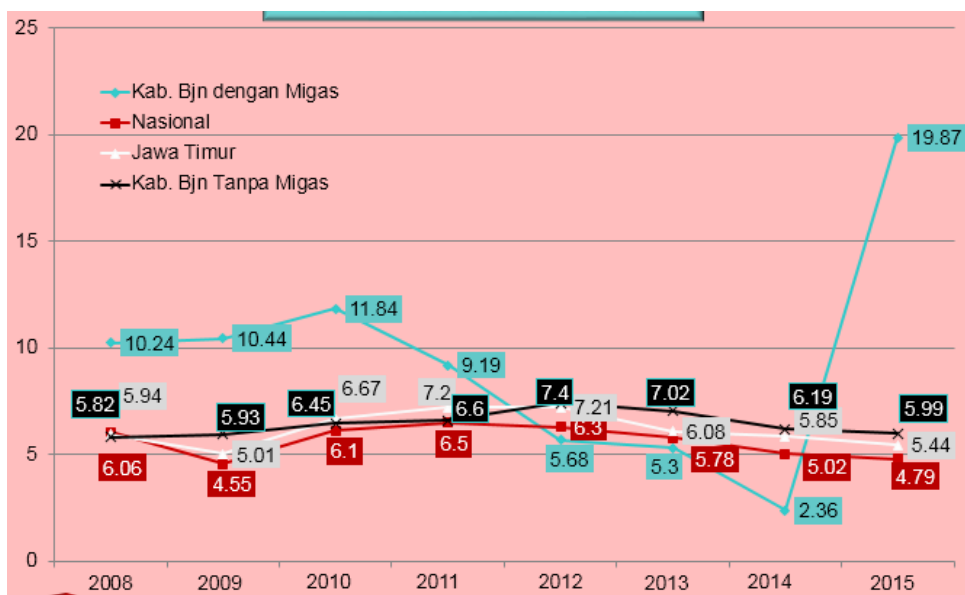
Bojonegoro juga memiliki potensi sumber daya alam, minyak dan gas bumi merupakan potensi penyumbang 20 % produksi nasional. Bojonegoro memiliki sejarah kemiskinan sejak jaman Belanda, oleh karenanya hingga saat sekarang kondisi tersebut merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan mata pencaharian, sebagian besar penduduk Kabupaten Bojonegoro adalah petani (43,66 %), perdagangan (18,43 %), buruh (14,81 %), jasa (11,12 %), industri (10,24 %), PNS, TNI, POLRI, Pensiunan (1,71 %). Kondisi lingkungan yang demikian, telah membentuk karakter masyarakat Bojonegoro terkait keterbukaan, yakni selalu menginginkan informasi secara lengkap dan tuntas terhadap berbagai aktivitas yang ada di lingkungannya.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2015 dari berbagai sektor

diantaranya sektor pertanian, sektor industri serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pertumbuhan Ekonomi juga dipengaruhi oleh keberadaan Proyek-proyek EPC migas yang sedang berlangsung yang secara langsung meningkatkan sektor konstruksi.

Gambar 2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro

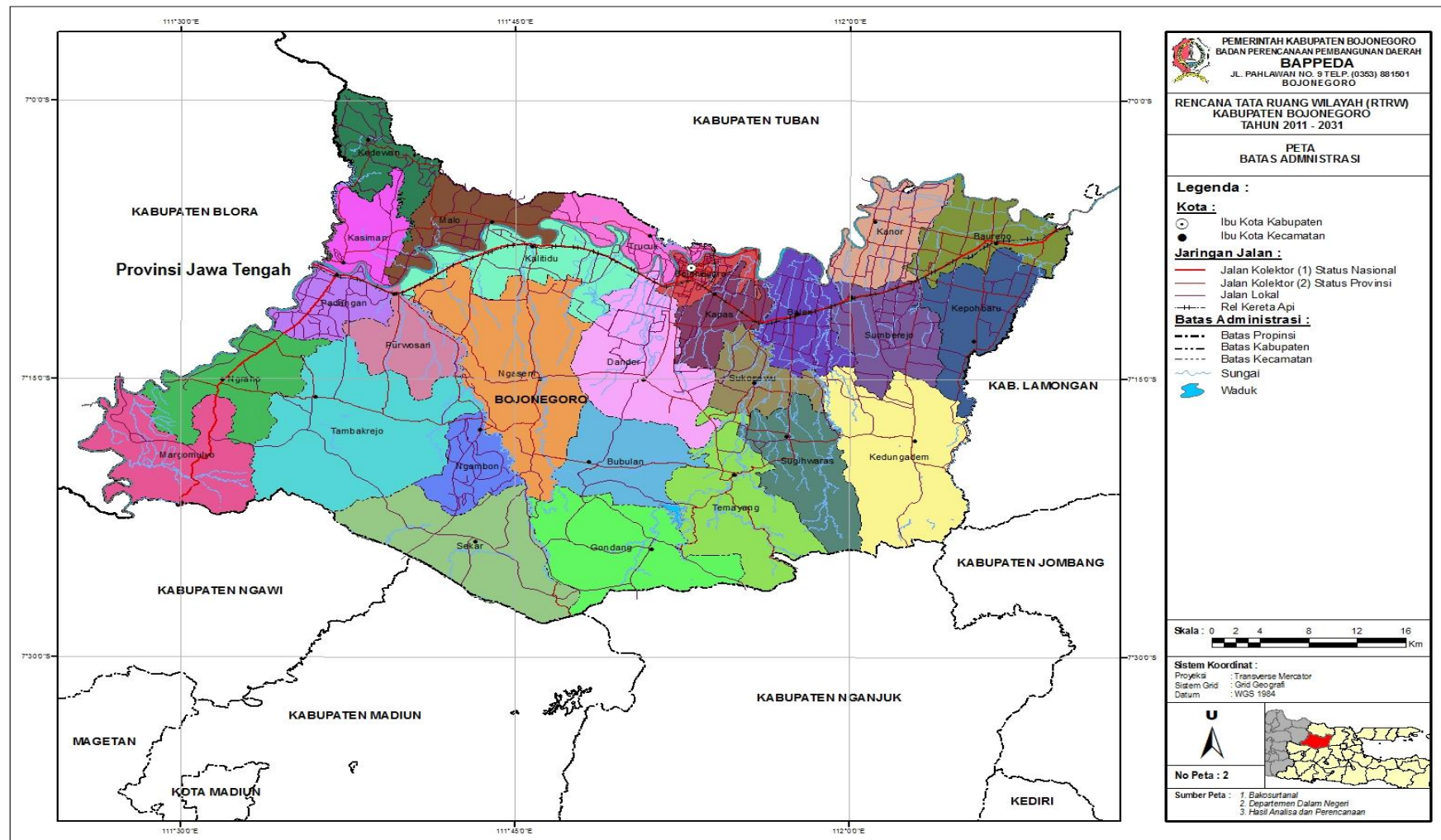


Permasalahan-permasalahan mendasar yang menjadi isu strategis adalah masalah infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan dan pertanian, tingkat kemiskinan masyarakat. Arah kebijakan untuk menjawab berbagai isu strategis tersebut adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seimbang dan berkelanjutan melalui peningkatan produksi pangan dan energi.
2. Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri dan sejahtera.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan yang profesional.

Gambaran tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap strategi implementasi keterbukaan informasi publik. Satu sisi masyarakat Bojonegoro merupakan masyarakat agraris, di sisi yang lain sedang tumbuh sebagai masyarakat industri dengan adanya sumber minyak dan gas bumi. Untuk itulah di awal kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro (kang Yoto-Kang Hartono), keterbukaan informasi publik merupakan spirit tata kelola pemerintahan Bojonegoro.

Gambar 3
Wilayah Kabupaten Bojonegoro



Keterbukaan Informasi publik di Kabupaten Bojonegoro, telah dikembangkan sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomo 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan pada tanggal 30 April 2008. Keterbukaan informasi publik melalui “**Sobo Pendopo**” dalam bentuk kegiatan Dialog Publik, telah dilakukan mulai tanggal 14 Maret 2008 hingga saat sekarang. Pelaksanaan dialog Publik di pendopo Malowopati Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dilaksanakan secara rutin setiap hari Jum’at setelah Jum’at-an mulai pukul 13.00 sampai dengan selesai. Masyarakat secara terbuka datang dan menyampaikan informasi, pengaduan, keluhan dan aspirasi secara bebas kepada Bupati Bojonegoro beserta jajarannya, dan saat itu sekaligus diberikan tanggapan dan tindak lanjutnya. Identifikasi berbagai aspirasi dalam dialog publik, diinventarisasi menjadi salah satu input dalam perumusan kebijakan program kerja SKPD.

Disamping dialog publik, juga dikembangkan sarana aksesibilitas informasi, antara lain melalui SMS pada Radio Malowopati FM serta Forum Radio Bojonegoro (FRB), twitter, SMS Pimpinan, Whatapps, Layanan Aspirasi Pengaduan On-Line Rakyat (LAPOR), dan sebagainya. Tentunya dalam pengelolaan Keterbukaan informasi Publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten maupun SKPD dengan web PPID, <http://ppid.bojonegorokab.go.id/>

Mekanisme penyelenggaraan pemerintahan secara dialogis, distributive pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, telah menjadi kajian dari berbagai Perguruan Tinggi dan kajian penulisan karya tulis ilmiah dari para mahasiswa dan beberapa tulisan jurnalistik di berbagai media <https://www.youtube.com/watch?v=iUkWiTsU39c>. Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika Serikat, adalah salah satu perguruan tinggi internasional yang telah melakukan penelitian terkait keterbukaan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yaitu oleh *Otto Scharmer* dalam buku **Leading from the Emerging Future: From Ego-System to Eco-System Economics** (by C. Otto Scharmer and Katrin Kaufer, 2013). <https://www.youtube.com/watch?v=KymNWrl9ER8> ;

PPID Bojonegoro

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kabupaten Bojonegoro sebagai pengelola kebijakan pelayanan informasi publik, dalam pelaksanaan tugasnya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana pelayanan informasi publik merupakan hak bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang dikelola oleh Badan Publik.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dalam implementasinya telah menuangkannya dalam RPJMD maupun Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai SKPD yang mengelola PPID kabupaten. Disamping itu pada seluruh SKPD telah ditetapkan penjabaran regulasinya. Berbagai dasar kebijakan tersebut merupakan pedoman dalam menetapkan strategi pencapaian target keterbukaan informasi publik, baik yang dilakukan oleh setiap SKPD yang tertuang dalam berbagai program kegiatannya maupun yang secara langsung dilaksanakan oleh PPID, yaitu kegiatan untuk mencapai target selama 5 (lima) tahun maupun tahunan yang tertuangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Renja Kerja (Renja) SKPD.

Penjabaran kebijakan pelayanan informasi publik, teruraikan dalam : (1) regulasi pelayanan informasi publik ; (2) PPID Kabupaten dan PPID SKPD.

1. Regulasi Pelayanan Informasi Publik

Dalam kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 dengan **VISI :**
“Terwujudnya Pondasi Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan dan

EnergiNegeriyang Produktif, BerdayaSaing, Adil,Sejahtera, Bahagia, danBerkelanjutan”, dimana pada **MISI** yang ke-3: **“Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan yang profesional”**, dengan sasaran meningkatnya : **“aksesibilitas bagi warga terhadap informasi pembangunan”**. Adapun indikator terhadap sasaran tersebut yaitu :

- (1) persentase cakupan wilayah untuk pelayanan informasi pembangunan;
- (2) persentase layanan interaksi pengaduan secara online.

Berdasarkan RPJMD tersebut, maka Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro menjabarkan dalam visi: **“ Menjadi Dinas Komunikasi Dan Informatika yang terbaik dalam mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal”**. Adapun Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan e-Government dan peningkatan profesionalisme pelayanan Pos dan Telekomunikasi
2. Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal melalui komunikasi sosial dan kemitraan profesi.

Pada penjabaran Misi 2 : Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal melalui komunikasi sosial, dan kemitraan profesi
Tujuan 1 : Meningkatnya penyebaran informasi, dengan **Indikator** : Meningkatnya cakupan penyebaran informasi, dengan sasaran, sebagai berikut :

Tabel 1

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra Dinas Kominfo

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya KIM yang berbasis IT	Persentase peningkatan KIM berbasis IT
2.	Meningkatnya kemitraan profesi	Persentase peningkatan kemitraan profesi
3.	Meningkatnya eksistensi PPID	Persentase peningkatan PPID yang sesuai regulasi
4.	Terbangunnya sarana prasarana penyebaran informasi	Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebaran informasi
5.	Meningkatnya fungsi komunikasi dan informatika	Persentase peningkatan fungsi komunikasi dan informatika

Untuk pencapaian sasaran tersebut di atas, dijabarkan dalam strategi :**“meningkatkan diseminasi informasi secara berkala didukung oleh peningkatan sumber daya komunikasi dan informasi serta peningkatan kuantitas, dan pendayagunaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berbasis IT”**. Sedangkan kebijakannya adalah :Melaksanakan kemitraan publikasi informasi ke berbagai media serta melakukan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan kepada lembaga-lembaga layanan publik

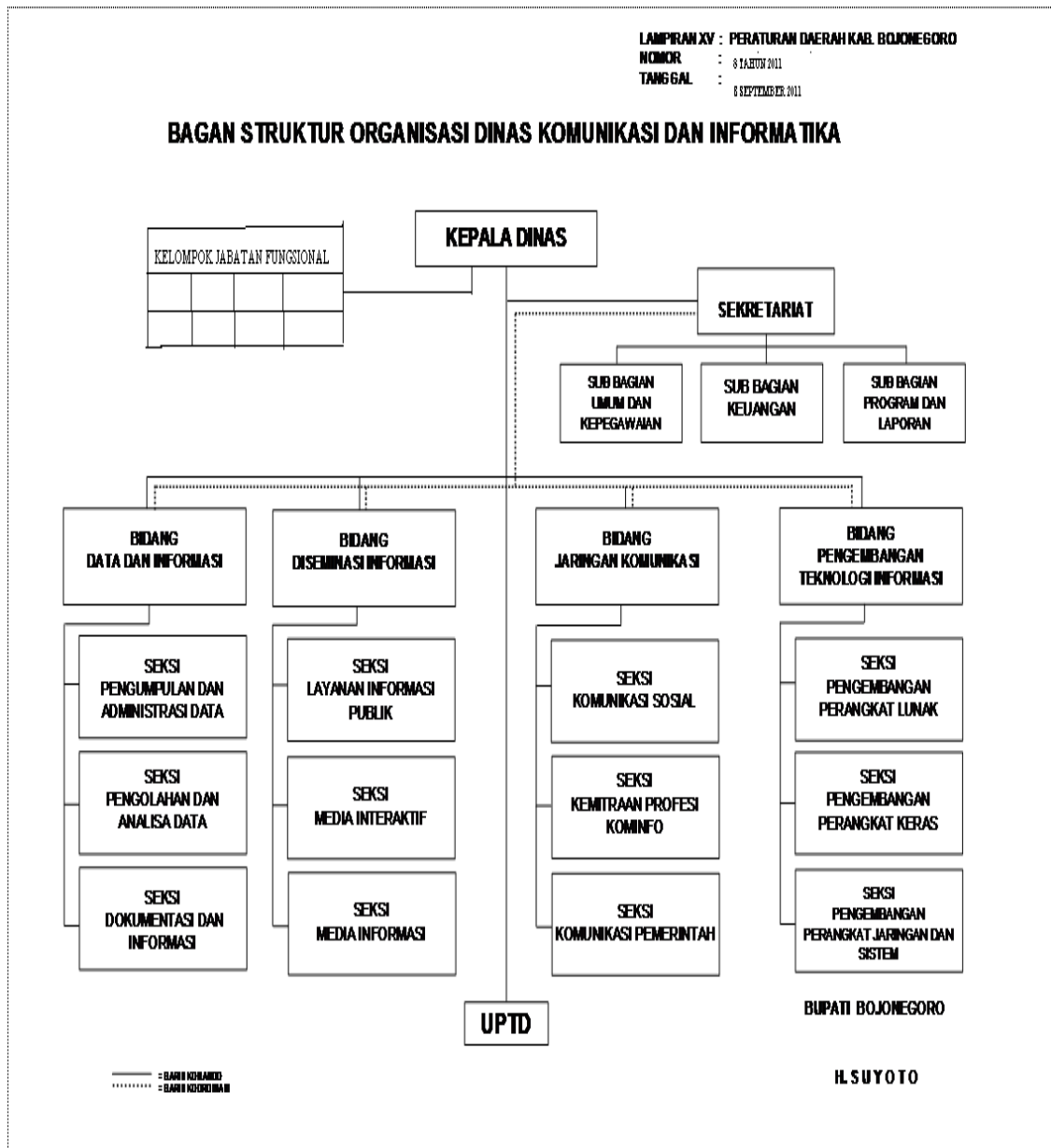
Mengacu pada kebijakan tersebut, dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dilandaskan pada suatu prinsip bahwa keterbukaan merupakan kebutuhan masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu. Sebagai penjabarannya sampai dengan tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, yaitu :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2012 tentang Transparansi Tata Kelola Pendapatan, Lingkungan, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi
- b. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 tentang Manajemen Informasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik di Kabupaten Bojonegoro.
- c. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- d. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (TKBP3).
- e. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/54/KEP/412.11/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan (PPID) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- f. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/211/KEP/412.11/2014 tentang Tim Perumus Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.

- g. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/397/KEP/412.11/2014 tentang Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan(TKBP3) Daerah.
- h. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/234/KEP/412.11/2015 tentang Tim Transparasi Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi DiKabupaten Bojonegoro Periode 2015 – 2018.
- i. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/247/KEP/412.11/2015 tentang Tim Perumus Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- j. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/132/KEP/412.11/2016 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016
- k. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor 188/037/412.45/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro
- l. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor 188/038/412.45/2015Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Informasi Melalui Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan Integrasi Layanan Permohonan Informasi Melalui LAPOR, SMS Radio Malowopati, Twitter Bupati dan Media Cetak Serta Desk Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro
- m. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor 188/068/412.45/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi Informasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bojonegoro yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 4
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan informatika
Kabupaten Bojonegoro



2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

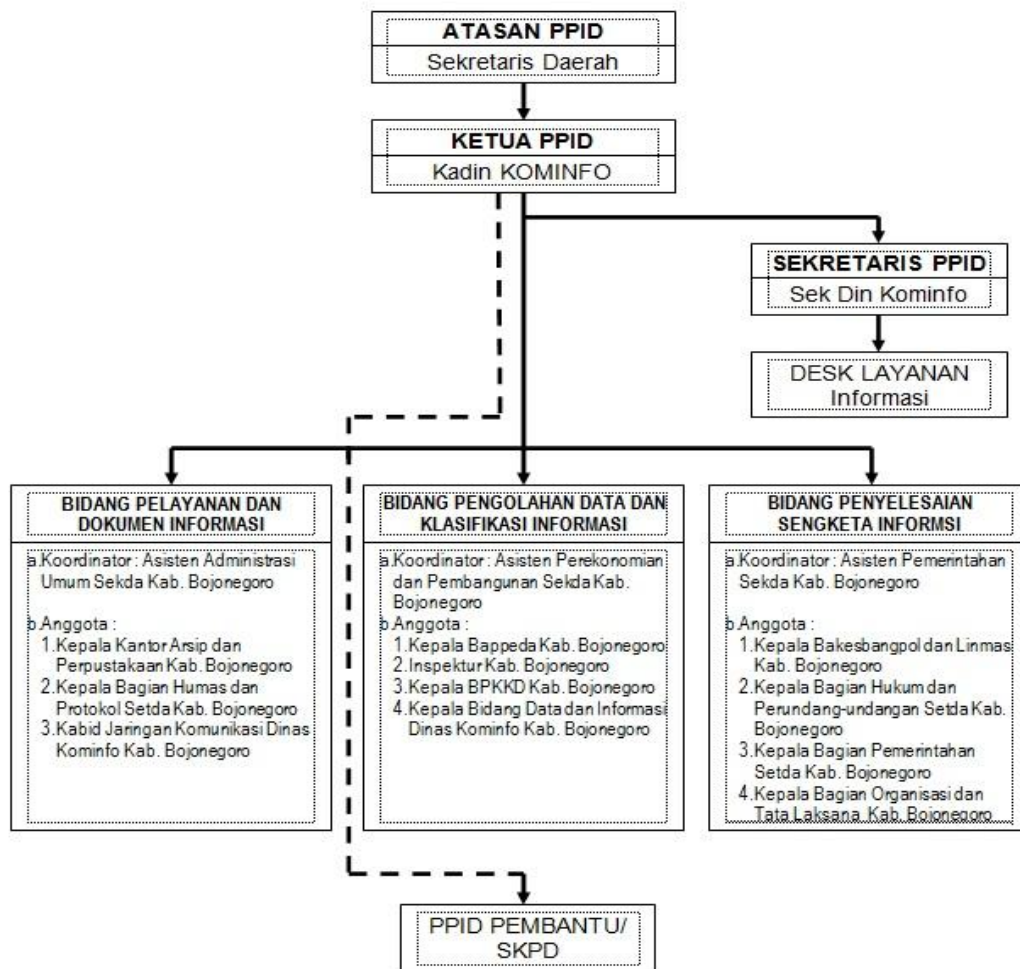
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro, dikelola oleh Dinas Komuniaksi dan Informatika

Kabupaten Bojonegoro, pada Bidang Jaringan Komunikasi Seksi Komunikasi Pemerintah. Penjabaran teknis pengelolaan PPID Kabupaten dan SKPD tertuang dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (terlampir). Untuk PPID Kabupaten menangani informasi dan dokumentasi Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah), Asisten Sekretaris Daerah dan bagian lingkup Sekretariat Daerah, serta mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi pada PPID SKPD.

Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Gambar 5

Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bojonegoro



Data PPID Kabupaten dan PPID SKPD serta BUMD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah terbentuk PPID, sebagai berikut :

Tabel 2
Data PPID Kabupaten, SKPD dan BUMD

No.	URAIAN	JUMLAH				PERSONIL	KET.
		PPID	Ada	belum	SK		
1.	PPID Kabupaten	1	1		1	18	
2.	SKPD						
	a. Badan	9	9		9	46	
	b. Dinas	17	17		17	83	
	c. Inspektorat	1	1		1	9	
	d. Sekretariat DPRD	1	1		1	5	
	e. Kantor	3	3		3	16	
	f. Kecamatan	28	28		28	107	
	g. RSUD	3	3		3	18	
	h. BUMD	6		6			
JUMLAH		69	63	6	69	302	

Sumber : Aplikasi Sistem Monitoring (Sismon)

Organisasi PPID SKPD, diketuai oleh Sekretaris untuk lingkup Badan, Dinas, Inspektorat dan Kecamatan, sedangkan untuk Kantor oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, untuk Sekretariat DPRD dan Direktur RSUD oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Masing-masing atasan langsung dari PPID adalah para Kepala SKPD. Struktur organisasi PPID Kabupaten maupun SKPD meliputi Atasan PPID, Ketua PPID, Sekertaris, Bidang Pengelola Informasi, Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Dokumen dan Arsip serta Bidang Pengaduan dan Bidang Penyelesaian Sengketa

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan semua aktivitas, merupakan kekuatan tersendiri, serta menjadikan spirit kerja untuk bersinergitas mencapai target kinerja. Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro (Kang Yoto-Kang Hartono), memiliki komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. Hal telah dibuktikan dengan berbagai mekanisme kemudahan aksesibilitas informasi melalui berbagai media, melalui twitter. Whatapps, layanan on-line, SMS langsung, SMS Radio Malowopati FM, Forum Radio, dialog interaktif/ dialog publik.

Untuk penguatannya, juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik NGO yang ada di Bojonegoro, antara lain Bojonegoro Institut (BI), Institute Development of Society (IDFoS), Sinergantara. Terkait dengan keterbukaan pengelolaan minyak dan gas bumi bersama Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

Bahkan ditahun 2016 ini para pihak telah bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bojonegoro yaitu :

1. Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Seknas OGI) mendampingi Bojonegoro dalam menentukan dan melaksanakan Rencana Aksi daerah di bidang Pemerintahan terbuka/Open Government, hal ini terkait pula dengan terpilihnya Kabupaten Bojonegoro sebagai kota kecil menjadi percontohan pemerintahan terbuka bersama 13 kota di dunia yang tergabung dalam Open Government Patnership (OGP) yang beranggotakan 68 Negara.
2. TP PKK Kabupaten Bojonegoro bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten

dalam mewujudkan Big Data/ Revolusi Data, data Dasa Wisma by name by address yang meliputi 300 indikator mulai pekerjaan, pendidikan, odf, jumlah tanaman yang dimiliki.

3. Beberapa NGO berskala Nasional dan Internasional bersama pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersinergi dalam penguatan Open Government yakni INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), Mediatrac, dll.

Dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dikelola oleh PPID Kabupaten Bojonegoro, sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana PPID di Kabupaten Bojonegoro, terletak pada 2 (dua) tempat, yaitu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro di jalan Ahmad Yani Nomor 4 Bojonegoro dan pada Desk Layanan Informasi PPID di jalan AKBP M. Suroko Nomor 11 Bojonegoro. Berbagai fasilitas tersebut adalah sebagai berikut :

a. Desk Layanan Informasi PPID Kabupaten

Layanan PPID Kabupaten, tidak menyatu dengan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Bojonegoro, namun disatukan dengan sarana media Center dan berada di Komplek gedung Radio Malowopati FM Bojonegoro, Jalan AKBP M. Suroko Nomor 11 Bojonegoro. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan pada Media Center sekaligus sebagai pusat bertemunya dari komunitas jurnalis/ media. Dengan demikian, akan dapat memberikan dukungan langsung terhadap berbagai sinergitas informasi.

Gambar 6

Desk Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi
PPID Kabupaten Bojonegoro



Desk layanan informasi PPID Kabupaten dilengkapi dengan ruangan desk layanan informasi PPID Kabupaten berukuran 6 x 8 meter, dilengkapi dengan fasilitas berupa: set ruang tamu/tunggu, kamar mandi, dapur, front desk informasi, 10 unit PC terkoneksi internet, jaringan wifi gratis, 1 (satu) unit scan, 3 (tiga) unit pendingin ruangan, display monitor tv 39", papan informasi, almari dan rak buku, booklet, leaflet, buku-buku seputar PPID, papan struktur organisasi, alur permohonan informasi, alur keberatan, poster-poster jam layanan dan jenis layanan, 2 (dua) orang petugas desk layanan informasi dan formulir-formulir hard copy dan digital.

Pada ruang Media Center yang menyartu dengan layanan permohonan informasi dan dokumentasi PPID, juga dilengkapi sarana diskusi untuk para pihak. Disamping itu juga diberikan sarana *free wifi* untuk memberikan penguatan layanan berbasis IT. Di sisi lain, apabila terdapat pendengar radio Malowopati FM, yang membutuhkan kejelasan informasi, dapat langsung terkoneksi dengan layanan PPID. Khusus papan informasi, PPID Bojonegoro memiliki papan informasi di samping

di desk layanan dan Dinkominfo juga ada papan informasi di seluruh Kecamatan, di area umum/tempat strategis.

Gambar 7

Sarana Penunjang Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi
PPID Kabupaten Bojonegoro



b. Desk Layanan Informasi PPID SKPD.

Untuk desk layanan informasi pada SKPD, berada pada masing-masing SKPD dengan sarana prasaran penunjang hampir sama dengan sarana prasaran yang ada di PPID Kabupaten. Antara PPID Kabupaten dan PPID SKPD telah terkoneksi dengan jaringan IT dan tersinergi dengan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan PPID. Beralamat di masing-masing badan SKPD yang terkoneksi dengan PPID Utama melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan PPID.

Gambar 8
Desk Layanan PPID SKPD



c. Desk Layanan Informasi Mobile

Merupakan layanan desk informasi PPID Utama dan SKPD, yang melekat pada kegiatan Dialog Publik setiap Hari Jum'at Pukul 13.00 Wib sampai dengan 15.00 Wib di Pendopo Malowopati Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Para pemohon informasi, permohonannya dicatat dan ditanggapi langsung oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah selaku atasan PPID, Ketua PPID Utama dan PPID SKPD.

Gambar 9
Desk Layanan PPID Dialog Publik



Apabila dalam pelayanan desk mobile ini tidak terselesaikan tuntas, permohonan informasi masyarakat akan terlayani dalam system LAPOR sehingga relative tidak ada permohonan yang tidak terlayani. Desk layanan informasi mobile, juga dilaksanakan melalui penguatan Keterbukaan Informasi Publik dan pelayanan informasi publik pada Bulan Pelayanan Publik, yaitu yang diawali 30 Mei di kecamatan Kepohbaru, Juli – Agustus di Kecamatan Padangan, Malo, Tambakrejo dan Sukosewu. Kegiatan Bulan Pelayanan Publik adalah salah satu inovasi pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Gambar 10
Desk Layanan PPID Bulan Layanan Publik



d. Desk Layanan Informasi Elektronik

Di era digitalisasi PPID Kabupaten Bojonegoro, juga telah mengembangkan layanan informasi melalui website, baik pada web site Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (<http://www.bojonegorokab.go.id>) dengan sub domain seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (antara lain :<http://bpkpd.bojonegorokab.go.id/>). Khusus untuk informasi layanan PPID pada Website PPID Utama <http://ppid.bojonegorokab.go.id/>.

Layanan lainnya yakni, implementasi aplikasi Layanan Aspirasi Pengaduan On-line Rakyat (**LAPOR!**) yang bekerjasama dengan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), sekarang adalah Kantor Staf Presiden (KSP) pada portal <https://www.lapor.go.id/>. Semua pengaduan masyarakat oleh admin utama maksimal 3 (tiga) hari kerja harus didisposisikan ke SKPD yang membidangi. Selanjutnya SKPD yang membidangi, maksimal 5 (lima) hari kerja harus memberikan tanggapan tindak lanjutnya yang didukung dengan dokumentasi. Apabila SKPD dalam waktu 5 (lima) hari kerja tidak menindaklanjuti, sistem akan memberikan *early warning* nyala warna “**merah**”. Sebaliknya apabila sudah ada tindak lanjut, akan berubah warna “**kuning atau masih aktif**”. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, apabila pemohon tidak memberikan sanggahan atau sudah merasa tercukupi, maka sistem akan berubah warna menjadi “**hijau**” yang diinterpretasikan “**selesai**”.

Gambar 11
Desk Layanan PPID LAPOR!



Ada beberapa cara untuk penyampaian pengaduan melalui aplikasi LAPOR!,

- (a) Menggunakan SMS: ketik BJN(spasi), isi laporan, kirim SMS ke 1708, lampirkan data dukung (foto, dan lain-lain)
- (b) Menggunakan twitter: login via twitter di www.lapor.go.id , sampaikan laporan di twitter dengan format #LAPOR BJN (spasi), isi laporan, mention @pembkab.bjn
- (c) Menggunakan SMS ke Halo Bupati nomor : 08113445999

Sarana penyampaian pengaduan melalui aplikasi **LAPOR!** telah dipublikasikan melalui berbagai media, baik cetak, elektronik, baliho, umbul-umbul, banner dan lain-lain.

Gambar 12
Publikasi Layanan Informasi



Pada tahun 2015, aplikasi **LAPOR!** telah dikembangkan dan diintegrasikan dengan sarana akses penyampaian informasi yang telah ada dan berkembang di Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik. Semua pengaduan yang berbasis non IT, diintegrasikan ke dalam sistim aplikasi **LAPOR!**, yakni Sistem Integrasi Aspirasi Publik- Layanan Aspirasi Pengaduan On-line Rakyat (SIAP-LAPOR).

Gambar 13
Sistem Integrasi Aspirasi Pengaduan-LAPOR!

The screenshot shows the LAPOR! Admin Page. The top navigation bar includes 'BERANDA', 'STATISTIK', 'OPINI KEBIJAKAN', and 'DASHBOARD'. The left sidebar contains 'Buat Pesan', 'Daftar Pesan', 'Bukan wewenang', 'LAPORAN MANUAL', 'FORM', 'DAFTAR', 'ARSIP', 'STATISTIK', 'TWITTER', 'Config', and 'Tweets'. The main content area is titled 'DATA PELAPOR' and contains the 'LAPORAN' form. The form includes fields for 'Email', 'No Telp', 'Nama Depan', 'Nama Belakang', 'Tanggal Laporan', 'Isi Laporan', 'Lampiran', 'Tag', 'Kalsifikasi', 'Kategori', 'Sumber Laporan', 'Area', 'Provinsi', and 'Kabupaten'. A red box highlights the 'Isi Laporan' field with the text 'Inputing pengaduan/ permohonan informasi secara integrasi dari sarana informasi'.

<https://www.lapor.go.id/admin20>

Hal-hal yang diintegrasikan adalah, semua pengaduan pada whatapps Bupati, pimpinan SKPD, pengaduan pada Radio Malowopati FM nomor Hp : 08113322958, pengaduan melalui twitter, pengaduan melalui group whatapps : kerja cepat tepat manfaat, monitoring keuangan dan pembangunan, sapa keluarga dengan kasih (sagasih), layanan beraskeluarga miskin (raslakin), berita jonegoroku. Prinsip yang diatur pada Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013, bahwa semua pengaduan dari masyarakat melalui berbagai saluran informasi, diolah dan diidentifikasi dan dijadikan input dalam perencanaan sekaligus dipilih dan dijadikan ide dalam pembangunan. Salah satunya adalah ide pembangunan jalan dengan paving.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro juga melakukan kerjasama dengan berita harian Jawa Pos Radar Bojonegoro, yakni terkait dengan berbagai pengaduan, keluhan baik yang langsung dari pembaca melalui twitter Radar Bojonegoro maupun dari wartawan Radar Bojonegoro. Berbagai keluhan, pengaduan tersebut diidentifikasi menjadi bagian permohonan informasi yang diteruskan kepada SKPD terkait. Demikian pula untuk kolom **Mata Radar**, yakni hasil “jepretan dari para jurnalis Radar Bojonegoro” terhadap kondisi sarana prasana umum yang kurang dan tidak layak.

Gambar 14
Kerjasama Layanan Permohonan Informasi



2. Anggaran PPID

Anggaran pelayanan informasi dan kegiatan PPID Kabupaten setiap tahunnya telah dianggarkan, pada penganggaran di Seksi Komunikasi Pemerintah Bidang Jaringan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika, yang pada tahun 2016 sebesar Rp. 254.384.000,-, sebagai berikut :

1. Program kerjasama informasi dengan media massa
 - Penyebar luasan informasi melalui media massa sebesar :
Rp. 134.172.000,-
2. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
 - a. Kegiatan : pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi, sebesar : Rp. 48.722.000,-
 - b. Kegiatan : pengumpulan data dan informasi daerah, sebesar :
Rp. 71.490.000,-
3. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
 - Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Untuk PPID SKPD, penganggarnya diikutkan di Sekretariat masing-masing SKPD yakni pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Sedangkan sebagian sudah memberikan honor pada pengelola PPID SKPD.

3. Daftar Informasi publik (DIP)

Guna memberikan kemudahan masyarakat memperoleh haknya untuk tahu semua informasi tentang Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro PPID Kabupaten maupun PPID SKPD/ Pembantu telah melakukan pemuktahiran data dan mengupload Daftar Informasi Publik (DIP) di website masing-masing Badan Publik. Sampai dengan tahun 2016 DIP yang sudah diupload PPID Kabupaten sejumlah 537 DIP sedangkan dari 68 SKPD yang telah mengupload DIP sejumlah 34 SKPD. Jumlah DIP yang di Upload di website SKPD sebanyak 518 DIP. Dengan demikian jumlah DIP pada PPID Kab Bojonegoro sebanyak : 1055 DIP,

Tabel 3
Data DIP PPID Kabupaten, SKPD, BUMD, Badan Publik Lain

No.	Uraian	Jumlah PPID	Daftar Informasi Publik				Jumlah DIP
			Berkala	Setiap -saat	Serta Merta	Dikecua likan	
1	PPID Kabupaten	1	√	√	√		537
	PPID SKPD Kantor	3					
2	Kantor Ketahanan Pangan		√				4
3	Kantor Arsip dan Perpustakaan						0
4	Kantor Satpol PP		√				5
	PPID SKPD Badan	9					
5	Badan PPKB		√	√			43
6	Badan Kepegawaian Daerah		√				9
7	Badan Kesbangpol dan linmas		√				4
8	Badan Lingkungan Hidup		√				4
9	BPMPD		√	√			4
10	Bappeda		√	√			14
11	Badan Perizinan		√	√			14
12	Badan PBD (BPBD)		√	√	√		14
13	Badan PKKD		√	√			13
	PPID SKPD Skretariat DPRD, Inspektorat, KPU						
14	Sekretariat DPRD Kab. Bojonegoro	1					0
15	Inspektorat	1	√	√			11
16	Komisi Pemilihan Umum	1	√	√			27
	PPID SKPD Dinas	17					
17	Dinas Pendidikan		√	√			24
18	Dinas Kebersihan dan Pertamanan		√	√			14
19	Dinas Koperasi, dan UKM						0
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		√	√	√		32
21	Dinas Pekerjaan Umum		√	√			34
22	Dinas Pendapatan Daerah		√	√			5
23	Dinas Perhubungan		√	√			32
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan						0
25	Dinas Pertanian						0
26	Dinas Peternakan dan Perikanan		√	√			10
27	Dinas Nakertransos		√	√			22
28	Dinas Perhutanan dan Perkebunan		√	√			59
29	Dinas Komunikasi dan Informatika		√	√			42
30	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		√	√			0
31	Dinas Pengairan		√	√			0
32	Dinas Kesehatan		√	√			9
33	Dinas ESDM		√	√			14

No.	Uraian	Jumlah PPID	Daftar Informasi Publik				Jumlah DIP
			Berkala	Setiap -saat	Serta Merta	Dikecua likan	
	PPID SKPD Kecamatan	28					
34	Kecamatan Balen		√				14
35	Kecamatan Baureno						0
36	Kecamatan Bubulan						0
37	Kecamatan Bojonegoro						0
38	Kecamatan Kalitidu						0
39	Kecamatan Gondang						0
40	Kecamatan Dander		√				6
41	Kecamatan Kanor		√				0
42	Kecamatan Kapas		√	√			17
43	Kecamatan Kasiman		√	√			1
44	Kecamatan Kedewan		√	√			14
45	Kecamatan Kedungadem		√				0
46	Kecamatan Kepohbaru		√				14
47	Kecamatan Malo		√				14
48	Kecamatan Margomulyo		√				14
49	Kecamatan Ngambon						0
50	Kecamatan Ngasem		√				1
51	Kecamatan Ngraho		√				1
52	Kecamatan Padangan						0
53	Kecamatan Purwosari		√	√			32
54	Kecamatan Temayang						0
55	Kecamatan Trucuk						0
56	Kecamatan Tambakrejo						0
57	Kecamatan Gayam						0
58	Kecamatan Sumberrejo						0
59	Kecamatan Sukosewu						0
60	Kecamatan Sugihwaras		√				7
61	Kecamatan Sekar						0
	PPID RSUD	3					
62	RSUD Bojonegoro						0
63	RSUD Sumberrejo						0
64	RSUD Padangan		√				2
	PPID BUMD	6					
65	PT. Asli Dharma Sejahtera (ADS)						0
66	PT. (BBS)						0
67	PT. Griya Dharma Kusuma (GDK)						0
68	PD. Pasar						0
69	PD. Air Minum (PDAM)						0
70	PD. (BPR)						0
	Total	70					1.055

Gambar 15
Layanan Informasi DIP pada Web PPID

Jl. AKBP M Soeroko 11 Bojonegoro (0353) 881454 ppidbojonegoro@gmail.com Jam Layanan 08:00 s/d 15:00
Search

[Beranda](#)
[Profil](#)
[Layanan Informasi](#)
[Informasi Publik](#)
[Laporan PPID](#)
[Pantau Banjir](#)
[Galeri](#)
[Kontak](#)

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BOJONEGORO

Home [Daftar Informasi Publik Bojonegoro](#)
Search: 2016

Show 10 entries

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Penanggung Jawab	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Secara Berkala	Setiap Saat	Serta Merta	Dikecualikan	Jangka Waktu Penyimpanan	Download
	Rencana Kegiatan Aksi 2016	Berisi tentang Rencana Kegiatan Aksi (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan RKA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bojonegoro	BPKKD, PPID	2016	Softcopy	Berkala				5 Tahun	Lihat
	Alokasi Dana Desa 2016	Berisi tentang Alokasi Dana Desa Seluruh Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016	BPKKD, PPID	2016	Softcopy	Berkala				5 Tahun	Lihat
	Rancangan Perda Tentang APBD 2016	Berisi tentang Ringkasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Bojonegoro	BPKKD, PPID	2016	Softcopy	Berkala				5 Tahun	Lihat
	Perda Tentang APBD 2016	Berisi tentang Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 Kabupaten	BPKKD, PPID	2016	Softcopy	Berkala				5 Tahun	Lihat

[dkp.bojonegorokab.go.id/ppid/dip/](#)

Peraturan

Klik Disini!!!

Kantor Maya

Bojonegoro Dalam Angka

DIP

Daftar Informasi Publik (DIP)

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Bojonegoro

Daftar Informasi Publik Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab Bojonegoro.xlsx : Kabupaten Bojonegoro

No.	Kode	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Penanggung Jawab	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia
1	bjn041.01	Kedudukan domisili dan alamat lengkap	Kedudukan domisili dan alamat lengkap Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro (Terdiri dari : Alamat, Nomor Fax/Tlp. dan E-mail)	Sekretaris	Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)	Softcopy, hardcopy dan website
2	bjn041.02	Visi dan Misi	Berisi tentang Visi dan Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro	Sekretaris	Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)	Softcopy, hardcopy dan website
3	bjn041.03	Tupoksi	Berisi tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro	Sekretaris	Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)	Softcopy, hardcopy dan website
4	bjn041.04	Struktur Organisasi	Berisi Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro	Sekretaris	Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)	Softcopy, hardcopy dan website
5	bjn041.05	Gambaran umum satuan kerja	Berisi gambaran umum tentang Dinas Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan tugas dan fungsi serta kedudukan dalam Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro.	Sekretaris	Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)	Softcopy, hardcopy dan website
6	bjn041.06	Profil singkat pejabat struktural	Berisi tentang gambaran umum secara singkat pejabat pejabat struktural di Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang berisi tentang Nama, Nomor Tlp. / HP Alamat Rumah, Pendidikan dan Penghargaan yang pernah diterima	Sekretaris	Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)	Softcopy, hardcopy dan website
7	bjn041.07	Perencanaan Kinerja Tahun 2014	Berisi tentang Perencanaan Kinerja Meliputi Sasaran dan Indikator, Program di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014	Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)	Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)	Softcopy, hardcopy dan website
			Berisi tentang Penetapan Kinerja di	Dinas Kebersihan	Dinas Kebersihan	Softcopy,

Posts **Comments** **Popular**

Aksi Peduli Lingkungan dalam rangka Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2016

Study Bending Dinas PUBM Kab Ngawi dan DAMN 1 Beureno ke TPA Banjarsari

Bimbingan Teknis Pembibitan Tanaman Hias / Bougenville

Materi Bimtek Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat dan Adiwiyata

Lihat Bougenville, Ingat Bojonegoro

Benita Video

Kelola Sampah Hasilkan B...

Video lebih banyak lagi silahkan klik disini

PPID

DIP Dinas Kebersihan dan Pertamanan

4. Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi di PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dari berbagai akses informasi di atas adalah sebanyak 3.732 permohonan, sedangkan dokumen yang dimohon oleh pemohon informasi publik melalui desk PPID diantaranya berupa KAK dan Dokumen Kontrak (LPSE), KUA PPAS 2015, RAPBD 2016, Perbub Penjabaran APBD 2016, Laporan Realisasi Semester 1 APBD 2014, Register SP2D, dan lain-lain (rincian dalam table 5).

Selama tahun 2016 ini, informasi yang paling banyak dimohon melalui saluran layanan informasi desk PPID dan juga melalui saluran layanan SMS Radio Malowopati serta layanan on-line, adalah mengenai pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk saluran layanan desk informasi mobile (dialog publik Jum'at) adalah seputar pemerintahan.

Adapun rincian pelayanan informasi publik tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 4
Data Layanan Informasi Langsung Melalui Desk
Semester 1 Tahun 2016

Bulan	Jml Permo honan	Pelayanan (hari)	Dikabulkan		Dito lak	Alasan Permohonan Ditolak		
			Penuh	Seba gian		Dikecu alikan	Belum Dikuasai	Lain nya
1	2	+10	0	1	1	1	0	0
2	5	5	4	0	1	0	0	1
3	5	+10	1	0	4	0	4	0
4	1	4	1	0	0	0	0	0
5	1	1	1	0	0	0	0	0
6	1	1	1	0	0	0	0	0
7	2	3	2	0	0	0	0	0
JML	17		10	1	6	1	4	1

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa pemohon informasi sebanyak 17 permohonan, dimana 11 permohonan atau 86% dikabulkan sedangkan 4 permohonan atau 14% ditolak dikarenakan data yang diminta belum terdokumentasi dan belum diaudit oleh BPK, sehingga dokumentasi dikaburkan sejumlah 3 (tiga) dokumentasi dan informasi, serta

1 (satu) permohonan ditolak karena pemohon tidak memenuhi persyaratan permohonan informasi.

Secara rinci permohonan informasi melalui desk layanan permohonan informasi, adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Rincian Pelayanan Informasi pada Desk layanan Permohonan Informasi
Tahun 2016 Semester 1

No Register	Pemohon	Isi Permohonan	Kegunaan	Status	Keterangan
01/I/PPID/BJN/2016	Siti Hawa	KAK dan Dokumen Kontrak tahun 2015 (LPSE) 20 Kegiatan	Kontrol Sosial	Ditolak Dokumentasi Informasi belum terdokumen dan/atau belum di periksa BPK	
02/I/PPID/BJN/2016	Sukadi	KAK dan Dokumen Kontrak tahun 2014 (LPSE) 14 Kegiatan	Kontrol Sosial	Terpenuhi 5 Dokumen	Hasil mediasi 9 dok Kontrak dipenuhi
03/II/PPID/BJN/2016	Imam Muchibul Ma'aruf	• KUA PPAS 2015 • RAPBD 2016 • Perbub Penjabaran APBD 2016 • Laporan Realisasi Semester 1 APBD 2014	Pengkayan data dan bahan diskusi	Terpenuhi	
04/II/PPID/BJN/2016	Imam Sugianto	Data Dinas PU Swakelola 2015	Pembelajaran	Ditolak, belum terdokumentasikan	Disarankan langsung ke PPID Dinas PU
05/II/PPID/BJN/2016	Link Kontrol	Register SP2D semua pengeluaran BPKKD	Studi Banding	Terpenuhi	
06/II/PPID/BJN/2016	Imam Muchibul Ma'aruf	SK PPID SKPD Dinas Kesehatan	Pengkayaan Data	Terpenuhi	
07/II/PPID/BJN/2016	AW. Syaiful Huda	Perda no 4 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan	Kajian Kebijakan dan Pengkayaan Data	Terpenuhi	
08/III/PPID/BJN/2016	Zulfian Ali Rohman	Perijinan LPP Malowopati	Adobsi Ijin	Terpenuhi	
09/III/PPID/BJN/2016	Siti Hawa	KAK dan Dokumen Kontrak	Kontrol Sosial	Ditolak, Belum terdokumentasikan di PPID Utama	Sengketa Informasi
10/III/PPID/BJN/2016	Sukadi	KAK dan Dokumen Kontrak	Kontrol Sosial	Ditolak, Belum terdokumentasikan di PPID Utama	Sengketa Informasi
11/III/PPID/BJN/2016	Siti Hawa	KAK dan Dokumen Kontrak	Kontrol Sosial	Ditolak, Belum terdokumentasikan di PPID Utama	Sengketa Informasi
12/III/PPID/BJN/2016	Sukadi	KAK dan Dokumen Kontrak	Kontrol Sosial	Ditolak, Belum terdokumentasikan di PPID Utama	Sengketa Informasi
13/IV/PPID/BJN/2016	IDFOS	• Data Wilayah Terisolir • Demografi Bojonegoro • Data Kemiskinan • Anak Usia Sekolah		Terpenuhi sebagian besar	Kurang 1 dokumen

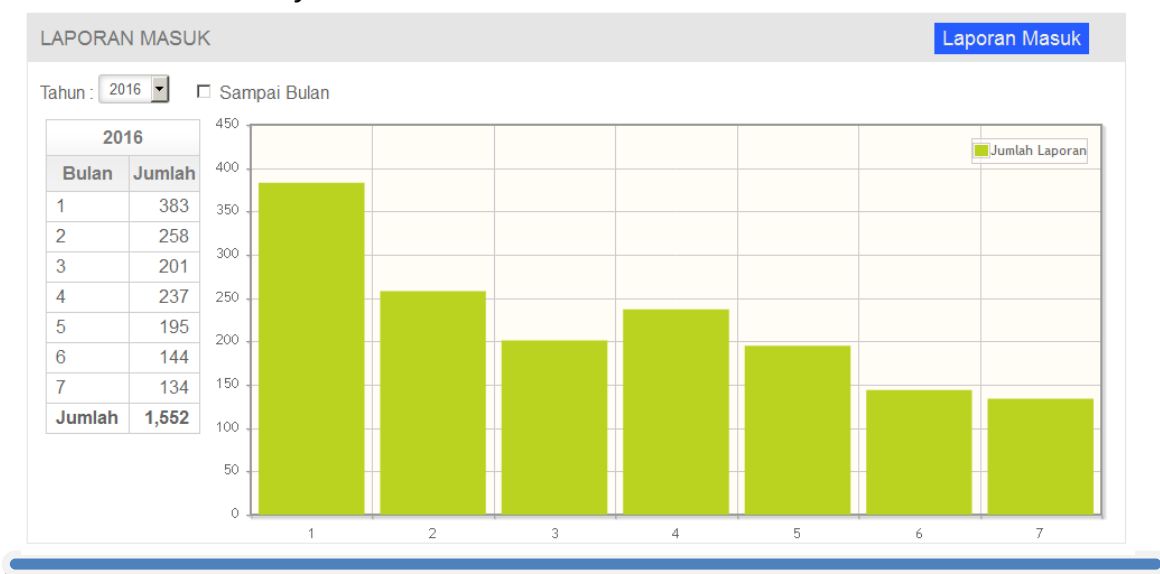
		• Usia Produktif • Marginal			
14/VI/PPID/BJN/2016	Trismayanti Yuliandani	• Data Penduduk 5 Tahun terakhir • Data Pendidikan • Data Ketenagakerjaan • Pendapatan Penduduk • Data Kesehatan • Struktur Politik	Memenuhi tugas Skripsi di Universitas Airlangga Jurusan Ilmu Politik	Terpenuhi	
15/VI/PPID/BJN/2016	Beny Kurniawan	• SOP Pengelolaan Kehumasan • Laporan Tahunan PPID • Uji Konsekuensi • SOP	Perbandingan SOP	Terpenuhi	
16/VII/PPID/BJN/2016	Imadudin	Struktur Organisasi dan Tupoksi Kominfo	Bahan studi pembuatan Kominfo di Kab. Tuban	Terpenuhi	

Berdasarkan Tabel 5 diatas maka pemohon informasi melalui desk layanan informasi dapat dijelaskan dari 16 pemohon 4 (Empat) pemohon informasi berasal dari NGO atau CSO, sedangkan 12 (Dua belas) pemohon informasi berasal dari perseorangan / individu dan dapat disimpulkan dokumen yang dimohon lebih dari 70% dipergunakan untuk kontrol sosial, pengkayaan data 20% dan 10% untuk bahan pembelajaran.

Selanjutnya terkait dengan permohonan informasi melalui aplikasi Layanan Pengaduan On-line Rakyat (**LAPOR!**) sampai dengan bulan juni sebanyak 1.418 permohonan. Permohonan tersebut semuanya dikabulkan atau ditindak lanjuti oleh SKPD yang membidangi, sebagaimana data statistik dari aplikasi **LAPOR!**, sebagai berikut:

Gambar 16

Layanan Permohonan Informasi Melalui **LAPOR!**

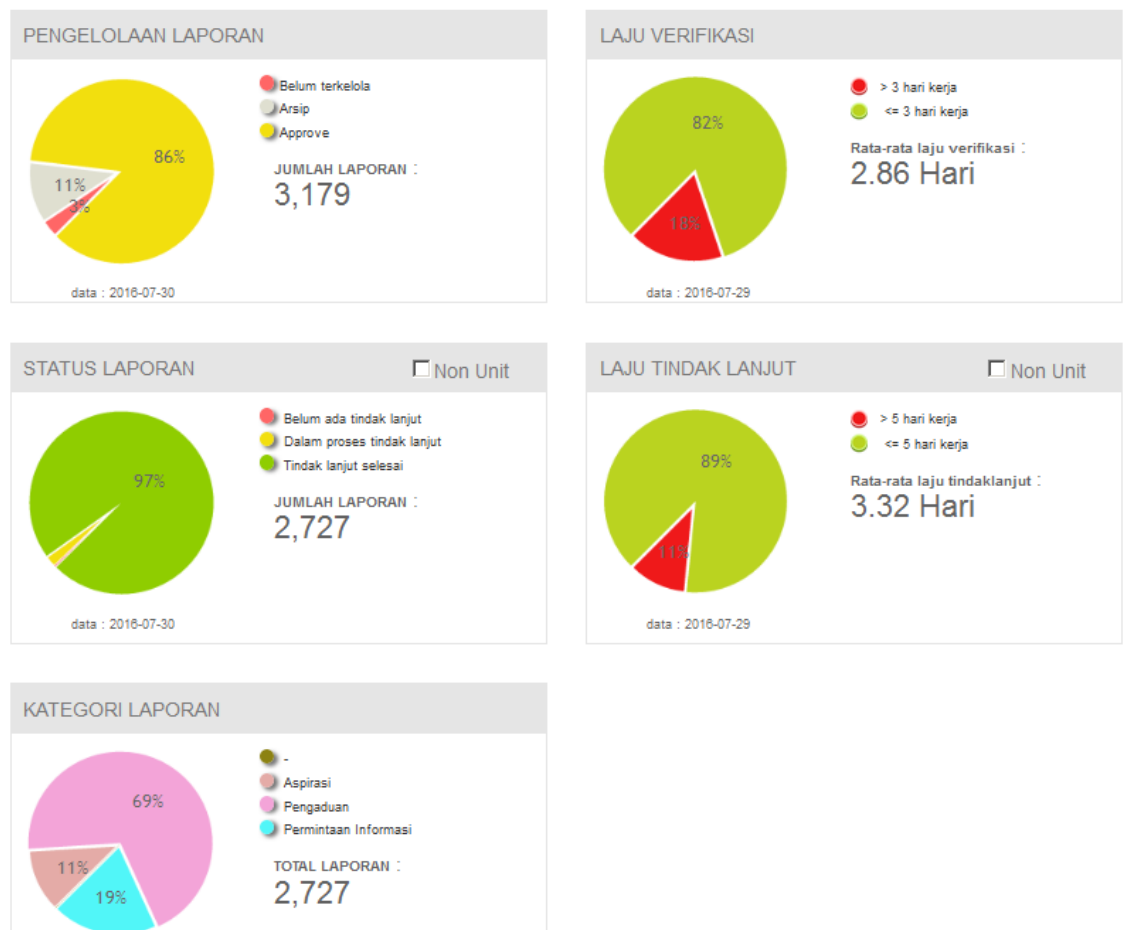


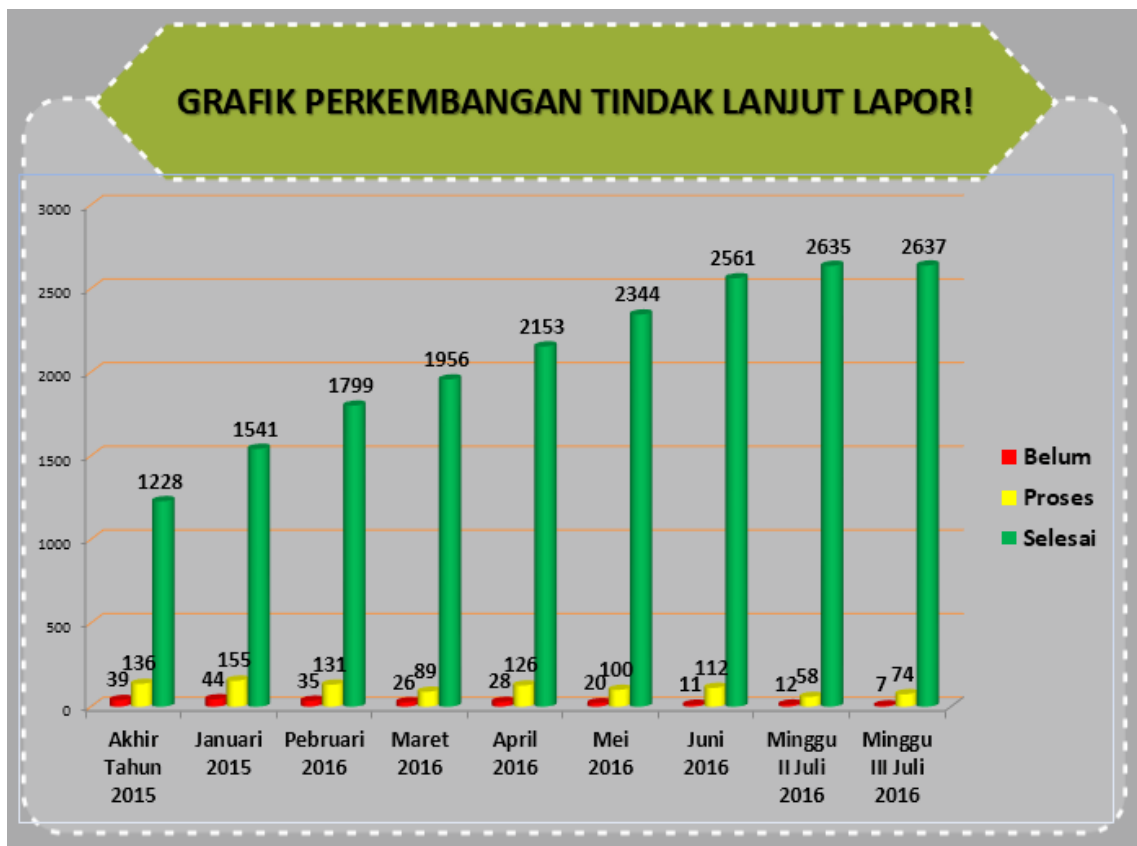
Rata-rata laju tindak lanjut terhadap berbagai permohonan informasi dari Admin Kabupaten ke SKPD adalah 2,86 hari kerja. Sedangkan tindak lanjut dari SKPD, rata-rata adalah 3,32 hari kerja. Hal ini dapat diartikan bahwa tindak lanjut layanan permohonan informasi telah memenuhi standar sistem dan ketentuan. Implementasi sistem aplikasi ini dipergunakan untuk evaluasi SKPD terhadap kecepatan respon publik, yang setiap hari Jum'at dilaporkan oleh Ketua PPID kepada Bupati yang dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD dalam Rapat Evaluasi Kinerja.

Gambar 17

Laju Tindak Lanjut Permohonan Informasi Melalui LAPOR!

Tahun 2016 Semester 1

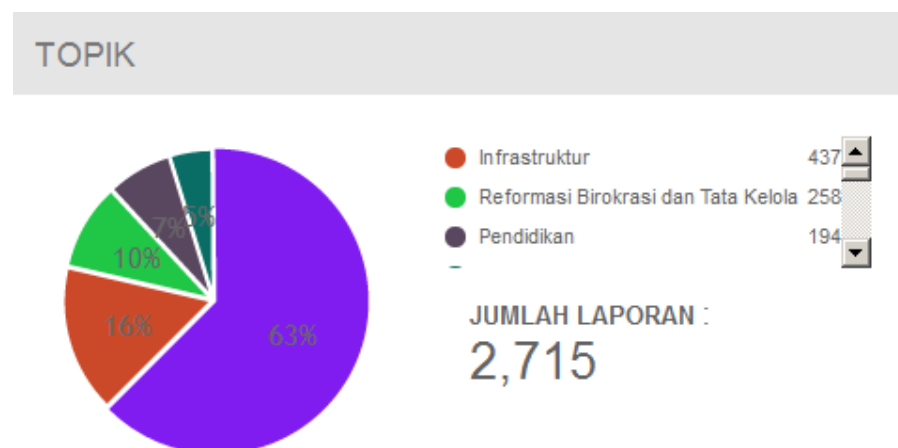


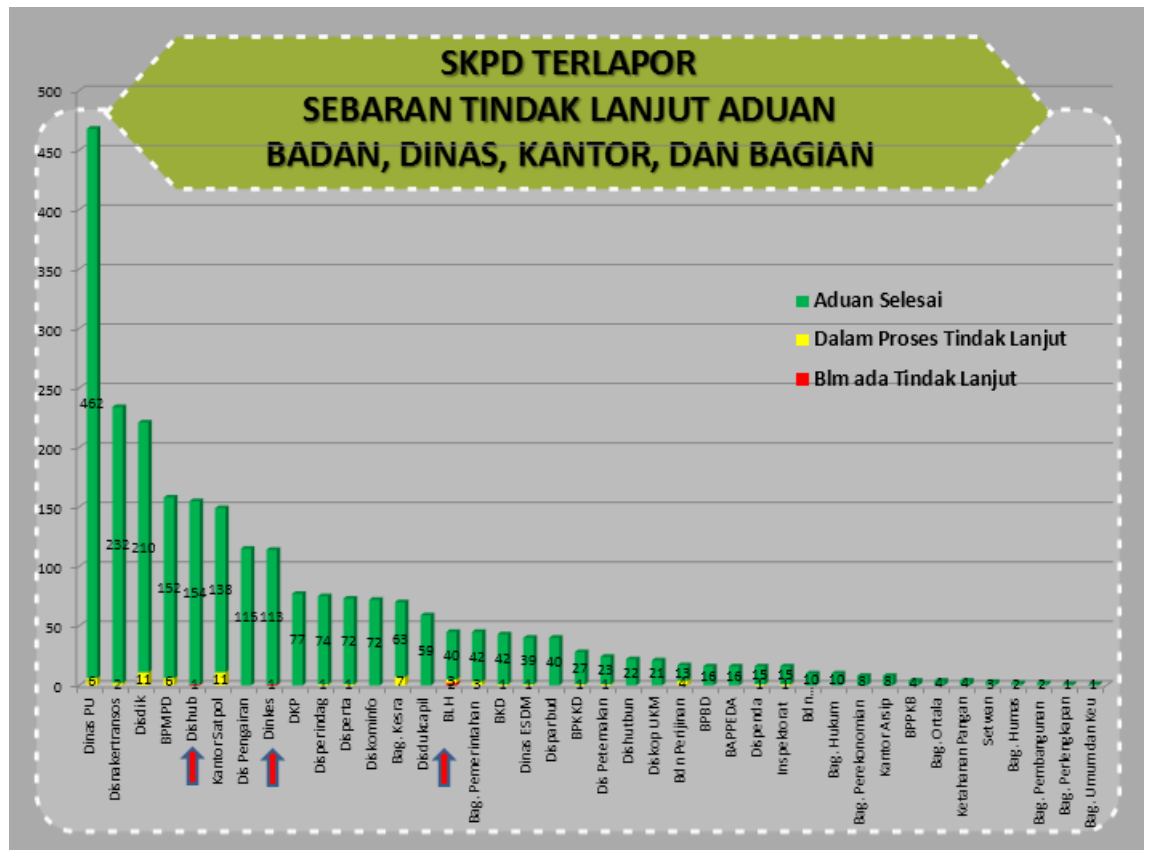


Topik Layanan informasi melalui LAPOR! di tahun 2016 Semester 1 yang dimohon meliputi : Infrastruktur 16%, Reformasi birokrasi 10%, Pendidikan 7%, Perhubungan 6% sedangkan sisanya 63% adalah topik lainnya dantopik terkait Lingkungan hidup, kesehatan, kesra, pertanian, perdagangan, ketenagakerjaan, pariwisata, dan lain-lain

Gambar 18

Topik Permohonan Informasi, dan SKPD Terlapor Melalui **LAPOR!**



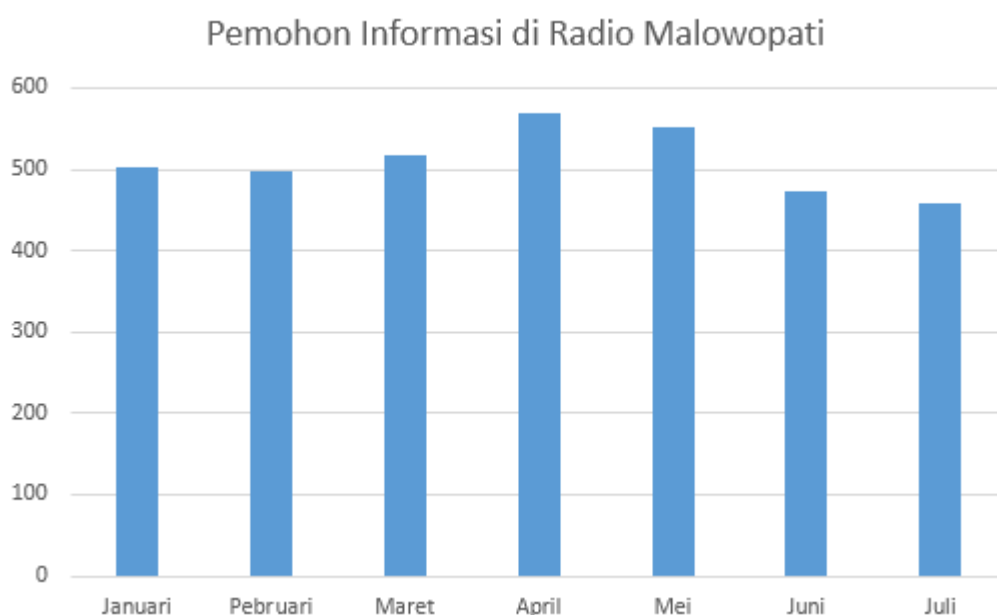


Permohonan informasi melalui Radio Malowopati FM pada tahun 2016 semester 1 sebanyak 3569 pemohon informasi, yang semuanya telah diberikan jawaban dan ditindaklanjuti secara penuh. Untuk memberikan pencerahan dan pemberdayaan kepada masyarakat, telah dikembangkan acara Ayo Mas Bro (AyoMasyarakat Bojonegoro Produktif) mulai pukul 08.00-09.30, dimana secara bergiliran Kepala SKPD menyampaikan program dan informasi yang dikelola oleh SKPD secara on-air kepada masyarakat. Masyarakat Bojonegoro/pendengar radio Malowopati diberikan keleluasaan untuk mengajukan permohonan informasi terhadap SKPD narasumber, dengan menghubungi on-line nomor HP : 08113322958.

Topik layanan informasi melalui SMS Radio Malowopati yang paling banyak dimohon : tentang pemerintahan 45%, pelayanan publik 20%, kesehatan 15%, pendidikan 5%, ketenagakerjaan 5%, lain-lain 10%

Gambar 19

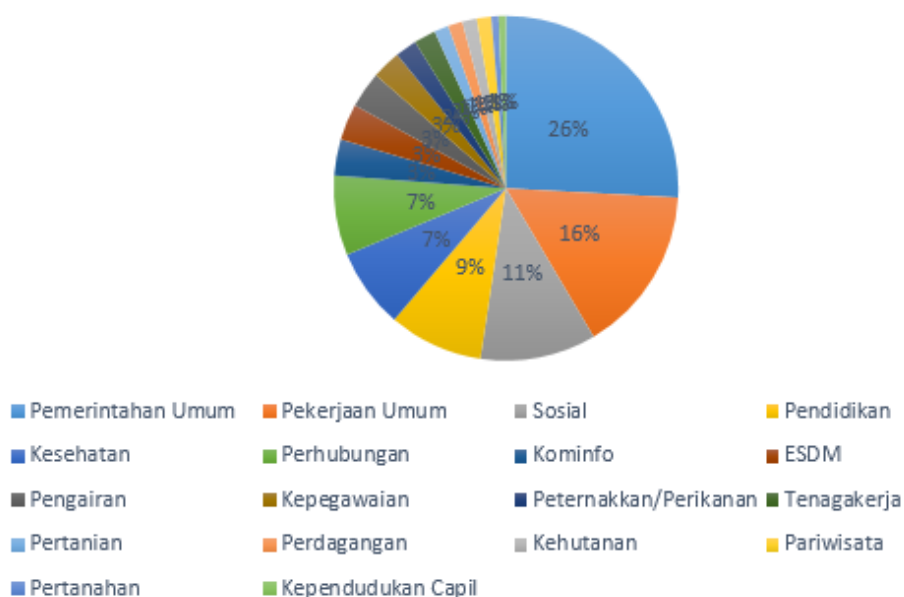
Grafik Permohonan Informasi Melalui Radio Malowopati



Desk layanan informasi melalui Dialog interatif/ Dialog Publik Jum'at, pada tahun 2016 semester 1 sebanyak 147 permohonan informasi yang semuanya telah dijawab dan ditindaklanjuti. Topik layanan informasi pada Dialog Publik “Sobo Pendopo” tahun 2016 semester 1 adalah : Pemerintahan 26%, Pekerjaan Umum 16%, Sosial 11%, Pendidikan 9%, Kesehatan 7%, Perhubungan 7%, dan 24% lain-lain meliputi sektor Kominfo, ESDM, Pengairan, Kepegawaian, Peternakkan/Perikanan, Tenagakerja, Pertanian, Perdagangan, Kehutanan, Pariwisata, Pertanahan, Kependudukan Capil.

Gambar 20

Grafik Permohonan Informasi Melalui Dialog Publik “Sobo Pendopo”
Pemohon Informasi di Sobo Pendopo



Pelaksanaan dialog publik yang dilakukan mulai tanggal 14 Maret 2008 hingga sekarang, disiarkan secara on-air pada Radio Malowopati 95,8 FM dan Radio Madani 125,5 FM. Pada tahun 2016, pelaksanaan dialog publik juga telah dikembangkan dengan streaming pada youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=h90mo39XaH0> (edisi 27 Mei 2016)

5. Sengketa Informasi Publik

Sampai dengan semester 1 tahun 2016 seluruh pemohon informasi baik secara langsung, online maupun melalui saluran lain telah terlayani secara maksimal, namun ada beberapa permohonan informasi yang terlambat terlayani mengingat dokumen belum terdokumentasikan di PPID Utama sehingga ada kelambatan layanan dan menyebabkan pemohon informasi tidak puas dan mengajukan keberatan yang pada akhirnya terjadi sengketa informasi.

Sengketa informasi tersebut dari 2 (dua) pemohon informasi yakni saudara Sukadi memohon 14 dokumentasi kegiatan dan Siti Hawa memohon 20 dokumen kontrak kegiatan. Dalam hal ini sengketa informasi saudara Sukadi telah selesai dengan mediasi, PPID Bojonegoro memberikan 5 dokumen kontrak secara langsung sedangkan sisanya pemohon oleh PPID di fasilitasi dalam memperoleh dokumen yang dimohon kepada PPID SKPD, sedangkan untuk permohonan Siti Hawa di tolak oleh Komisi Informasi mengingat dokumen yang di mohon belum selesai di audit oleh BPK.

Di semester 1 ini kedua pemohon tersebut memohon lagi 65 dokumen kontrak kegiatan yang saat ini dalam proses sengketa informasi.

Kendala dan Pengembangan

Kendala dalam setiap pelaksanaan kegiatan, bukan merupakan hal yang diharapkan, tetapi merupakan hal yang harus tetap diperhatikan. Bercermin dari kendala dan kelemahan, dapat dijadikan kekuatan dan peluang. Oleh karena itu, pada uraian ini, berbagai kendala dan kelemahan dijadikan dasar untuk pengembangan dan inovasi.

1. Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Bojonegoro, antara lain :

- a. Terbatasnya personil yang kompeten terkait keterbukaan informasi publik
- b. Belum seluruh SKPD/ Badan Publik komitmen terhadap keterbukaan informasi publik
- c. Belum semua SKPD/ Badan Publik, tersedia desk layanan informasi
- d. Belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali
- e. Belum optimalnya pengelolaan informasi berbasis IT serta terbatasnya personil yang berkompenten di bidang IT
- f. Masih belum terpahamkannya hak dan kewajiban publik terhadap keterbukaan informasi, sehingga masih adanya persepsi pemanfaat informasi belum sesuai dengan ketentuan bagi para pemohon
- g. Adanya permohonan informasi yang tidak serius dan belum memahami SOP pelayanan permohonan informasi

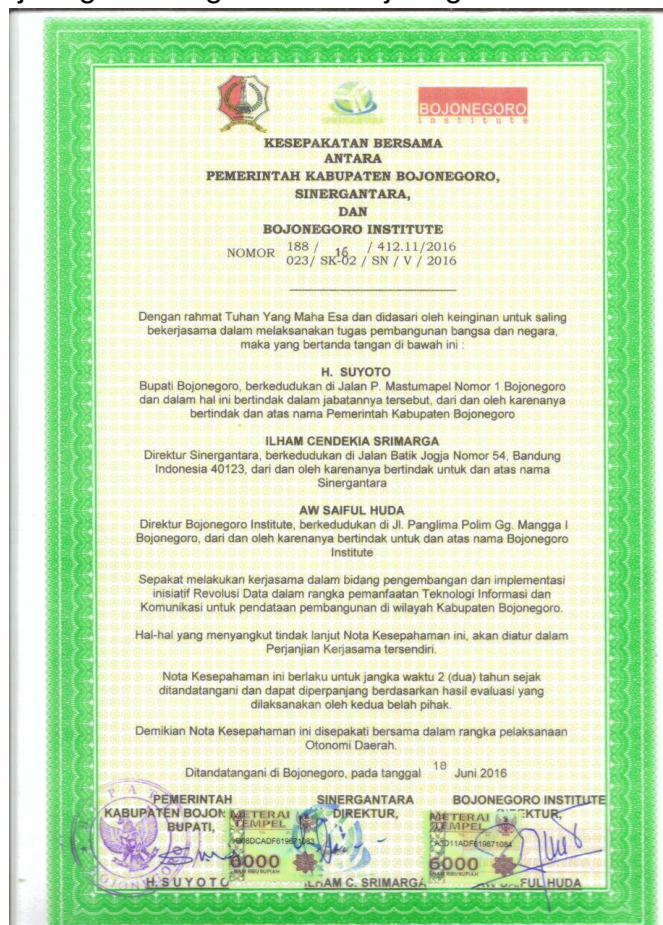
2. Pengembangan/ Inovasi

Dalam upaya penguatan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, PPID Bojonegoro telah melakukan berbagai kerjasama dengan beberapa stakeholder/ mitra profesi, antara lain:

- a. Media cetak Radar Bojonegoro, yakni terkait berbagai informasi masyarakat yang menjadi headline pemberitaan sekaligus permohonan informasi melalui “twitter” dan “mata radar” dalam mekanisme keterbukaan informasi publik.
- b. CSO Bojonegoro Institute dan Sinergantara, yakni Nota Kerjasama kesepahaman antara Bupati Bojonegoro dengan CSO Bojonegoro Institute dan Sinergantara tentang pengembangan dan implementasi inisiatif Revolusi Data dalam rangka pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pendataan pembangunan di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Gambar 20

MOU Bupati Bojonegoro dengan CSO Bojonegoro Institute dan Sinergantara



- c. Forum Radio Bojonegoro (12 Radio) tentang akses saluran informasi masyarakat melalui media radio. Para pengelola radio yang tergabung dalam Forum Radio Bojonegoro, diberikan keleluasaan untuk menghimpun berbagai aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan/ mengemas penyampaian aspirasi tersebut sesuai style dari radio masing-masing,
- d. Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berbasis IT, yaitu dengan masing-masing KIM membuat blog. Melalui blog KIM tersebut, dapat dipublikasikan berbagai potensi dan kegiatan pemerintahan desa, termasuk publikasi pemanfaatan dan penggunaan anggaran desa. Hingga saat sekarang telah terbentuk sejumlah 68 blog KIM.
- e. Rintisan PPID Desa, dalam upaya memujudkan system layanan informasi desa (SLID) PPID Bojonegoro mewujudkannya melalui pembangunan web desa (webdes) dengan domain desa (nama desa.id), salah satunya adalah desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo <http://pejambon-bjn.desa.id/transparansi-desa/>. Di tahun 2015 terbangun 68 web desa untuk tahun 2016 mulai bulan Juni memfasilitasi aktivasi web desa se-Kecamatan Baureno, Kecamatan Balen dan Kecamatan kalitidu yang saat ini dalam proses, direncanakan ada penambahan 50 web desa dengan tema pokok Transparansi Desa.
- f. Instruksi Bupati Bojonegoro tentang keterbukaan informasi Pemerintahan desa yang pada prinsipnya berisi mewajibkan kepala Desa mengumumkan perencanaan dan kegiatan dalam bentuk banner, spanduk, yang isinya Besaran anggaran yang ada di desa, Kegunaan anggaran, lokasi dan penanggungjawabnya, Rencana anggaran dan kegunaannya untuk tahun depan, Memberikan contact person apabila ada saran, usulan dan pertanyaan dari masyarakat <http://ppid.bojonegorokab.go.id/instruksi-bupati-bojonegoro-dalam-rangka-pelaksanaan-ogp/>

- g. SIAP LAPOR!SIAP LAPOR! adalah Sistem Integrasi Aspirasi Publik Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat yakni seluruh layanan informasi yang ada di Kabupaten Bojonegoro baik melalui Dialog Publik, SMS Malowopati, Desk PPID maupun media layanan lainnya di integrasikan dalam aplikasi LAPOR, sehingga aduan, saran, kritik, permohonan informasi yang belum dijawab/ditindak lanjuti/dikabulkan akan teridentifikasi dengan jelas melalui aplikasi ini. Setiap jum'at pagi, responsibilitas Badan Publik terhadap layanan informasi secara rutin dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Bupati bersama-sama Kepala SKPD.
- h. Aplikasi Dasawisma Merupakan revolusi data yang sedang dikembangkan ditahun ini yakni pendataan detail di tingkat Dasawisma Desa, dalam pelaksanaannya melibatkan peran masyarakat/PKK Desa tingkat Dasawisma. Data ini merupakan data dasar terdiri dari 300 kolom yang menjelaskan dari indikator Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC) meliputi 20 (dua puluh) indicator. Dengan terumuskannya data dasar desa, maka kebutuhan data dan informasi bagi masyarakat pemohon informasi akan secara cepat dapat terpenuhi.
- i. Mediatrac, di tahun 2016 ini Mediatrac bekerjasama dengan Pemerintah kabupaten Bojonegoro akan membangun aplikasi Big Data untuk mensukseskan Open Government
- j. Pada tahun 2016, Kabupaten Bojonegoro, menjadi percontohan dunia sebagai Pemerintahan terbuka / Open Government Patnership Kabupaten Bojonegoro bersama Kota Seoul (Korea Selatan) dan Tbilisi (Georgia) adalah percontohan pemda pertama di Asia, bersanding dengan 13 kota besar di dunia dari 45 kota yang mendaftar pada ajang ini

3. Rencana Tindak dan Target Tahun 2016

Rencana Aksi Keterbukaan Informasi Publik PPID Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 disamping penguatan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan bagi Ketua PPID SKPD se-Kabupaten Bojonegoro yang diselenggarakan oleh BKD pada bulan Maret 2016, juga memasukan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik SKPD dalam rencana aksi SKPD di aplikasi SISMON (Sistem Monitoring) yang mana aplikasi tersebut dikelola oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Aplikasi SISMON ini merupakan tools bagi SKPD untuk menilai apakah pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan searah dan sudah terlaksana sesuai jadwal rencana aksi. Dalam rencana aksi ini SKPD pada bulan Juni sudah harus memiliki DIP di website PPID SKPD, merealisasikan desk layanan informasi secara fisik, dan memiliki SK PPID SKPD.



Disamping itu melaksanakan penguatan KIP melalui aktivasi website desa di tahun 2015 terbentuk 68 web desa, tahun 2016 penambahan web desa berbasis KIP sejumlah 50 web desa, dan revolusi data Dasawisma di tingkat Dasawisma Desa bekerjasama dengan Tim penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro, dengan target, data dawis tersebut dimasukan ke aplikasi TI yang dalam prosesnya melatih sekitar 1000 anggota PKK.



Selanjutnya menyusun Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintahan, sebagai bagian keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Open Government Patnership (OGP) tahun 2016-2017, yang dalam pelaksanaannya di dampingi oleh Seknas OGI dan NGO baik dari Bojonegoro maupun NGO Nasional.

Untuk keberlanjutan apa yang telah dicapai Pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik / Open government di tahun 2016 ini DPRD Kabupaten Bojonegoro menginisiasi di tetapkannya peraturan daerah tentang pedoman KIP di Kabupaten Bojonegoro yang saat ini dalam proses pembahasan rancangan Perda KIP.

Penutup

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di tahun 2016 Semester 1, PPID Kabupaten Bojonegoro, yang dalam ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika bersama instansi terkait, telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Beberapa kegiatan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut :

1. Kategori Kabupaten Terbaik II pada PPID Award KIP Provinsi Jatim Tahun 2015
2. Kategori Kabupaten Terinovasi pada PPID Award KIP Provinsi Jatim Tahun 2015.
3. Kategori Kabupaten Laporan Tahunan Terbaik pada PPID Award KIP Provinsi Jatim Tahun 2015
4. Nominator Kategori Meja Layanan Terbaik Kabupaten pada PPID Award KIP Provinsi Jatim Tahun 2015
5. Pemerintahan Terbuka dari Sekretariat Nasional Open Government Indoensia (OGI)
6. Kabupaten Bojonegoro mewakili Indoensia bersama Kota Seoul (Korea Selatan) dan Kota Tbilisi (Georgia) adalah percontohan pemerintah daerah pertama di Asia, bersanding dengan 13 kota besar di dunia

Demikianlah Laporan Tahunan PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 Semester 1, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mencapai Open Government, good and clean Government.

DOKUMEN



Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Perbub KIP bersama DPRD
Kabupaten Bojonegoro



Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD setiap Hari Jum'at Pagi sampai jam 12.00
di Rumah Dinas Bupati



Ayo Mas Bro di Pekan Pelayanan Publik Kecamatan Padangan



Layanan Informasi Publik dalam Pekan Pelayanan Publik



Revolusi Data: Pelatihan Update Aplikasi Data Dasawisma bersama Kecamatan Sekar dan Kecamatan Gondang



Revolusi Data Melalui Dasawisma seluruh Desa di Kabupaten Bojonegoro

- <http://www.kanalbojonegoro.com/buku-data-dasawisma-potret-jujur-profil-des/>
- <http://www.kanalbojonegoro.com/melihat-potret-pkk-bojonegoro-lewat-buku-dasarwisma/>
- <http://www.kanalbojonegoro.com/pkk-bojonegoro-latih-kader-isi-buku-dawis-dengan-it/>
- Bojonegoro, Revolusi Data melalui Aplikasi Data Dasa Wisma
<https://www.youtube.com/watch?v=1b5FLrdWkNg>



Rapat koordinasi Pembahasan Permohonan Informasi



Penguatan Keterbukaan Informasi Publik dengan Jurnalis Komunitas Forum Radio Bojonegoro, Forum KIM Bojonegoro, BLOGGER dan RTIK

LINK PEMBERITAAN On-LINE

- <http://www.beritasatu.com/nasional/360148-infid-sambut-baik-bojonegoro-jadi-percontohan-pemda-terbuka.html>
- http://www.beritajatim.com/berita_migas/240806/eiti : transparansi migas masih sulit diterapkan.html
- <http://www.idfos.or.id/serderhana-dan-menunjukkan-ciri-khas-bojonegoro/>
- <http://kanalbojonegoro.com/ppid-bi-gelar-diskusi-evaluasi-pelayanan-informasi-publik/>
- <http://infopublik.id/read/115551/ppid-bojonegoro-sosialisasikan-kip-melalui-media-film.html>
- http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Indonesia%20Self%20Assessment%20Report%20March%202015%20Annex%20-Tabel%20capaian%20Renaksi%20OGI%202014_280415_Publikasi.pdf
- <http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/BI%20Eng.pdf>
- <http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/IDFos%20Eng.pdf>
- <http://www.opengovpartnership.org/node/8968>
- <http://www.opengovpartnership.org/blog/ogp-webmaster/2016/04/14/press-release-fifteen-local-governments-chosen-international-open>
- <http://www.opengovpartnership.org/blog/ogp-webmaster/2016/04/12/announcing-commencement-subnational-pilot-program-15-countries>
- <http://www.opengovpartnership.org/node/9079>
- <http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/subnational-government-pilot-program>
- <http://www.suara.com/wawancara/2016/04/04/070000/suyoto-berantas-korupsi-dengan-sistem-telanjang-ala-bojonegoro>
- <http://www.tribunnews.com/regional/2016/04/08/bojonegoro-terpilih-jadi-pilot-project-reformasi-birokrasi>
- <https://news.detik.com/berita/3182955/bojonegoro-jadi-pilot-project-grand-design-reformasi-birokrasi-kemenpan-rb>
- <http://www.beritametro.co.id/jawa-timur/kemenpan-rb-jadikan-kabupaten-bojonegoro-pilot-project>
- <https://news.detik.com/berita/3183785/hebat-bojonegoro-sejajar-dengan-kota-kota-besar-dunia-soal-transparansi>
- <http://www.beritametro.co.id/jawa-timur/bojonegoro-raih-ogp-2016>
- <https://news.detik.com/berita/3187758/sejajar-dengan-paris-bojonegoro-jadi-pelopor-open-government-di-indonesia>
- <http://news.metrotvnews.com/politik/VNnxj2k-bojonegoro-disetarakan-madrid-dan-paris>
- <http://news.metrotvnews.com/read/2016/04/14/513585/kunci-bojonegoro-bisa-dianggap-selevel-madrid-paris>
- <https://news.detik.com/berita/3184727/matoh-pertumbuhan-ekonomi-bojonegoro-di-atas-10-persen>
- <http://nasional.kompas.com/read/2016/04/14/23023341/Sukses.Bawa.Bojonegoro.dalam.Pemerintahan.Terbuka.Suyoto.Maju.pada.Pilkada.DKI>

- <http://nasional.kompas.com/read/2016/04/15/07155901/Mengenal.Manajemen.Pemerintahan.Berbasis.Publik.ala.Bupati.Bojonegoro>
- <http://regional.kompas.com/read/2016/04/14/23161321/Bojonegoro.Terpilih.Jadi.Pemerintahan.Daerah.Terbuka.Tingkat.Dunia>
- <http://www.beritasatu.com/nasional/360148-infid-sambut-baik-bojonegoro-jadi-percontohan-pemda-terbuka.html>
- <http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/04/15/o5nvc812-dialog-jumat-embuskan-keterbukaan-di-bojonegoro>
- <https://news.detik.com/berita/3185814/resep-kang-yoto-wujudkan-good-clean-and-innovative-governance-di-bojonegoro>
- <http://berita.suaramerdeka.com/bojonegoro-terpilih-sebagai-percontohan-pemerintah-daerah-terbuka/>
- <https://news.detik.com/berita/3185280/politik-happy-kang-yoto-sukses-membangun-bojonegoro>
- <http://opengovindonesia.org/berita/siaran-pers-bojonegoro-terpilih-sebagai-percontohan-pemerintah-daerah-terbuka-open-government-partnership/>
- <http://www.antaraneews.com/video/25154/bojonegoro-terpilih-sebagai-percontohan-ogi>
- <http://www.antaraneews.com/video/25156/penerapan-ogi-di-bojonegoro-sejalan-nawacita>
- <http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/803/Bappenas-Ajak-Bojonegoro-ikut-OGI>
- <http://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/128>
- <http://infid.org/wp-content/uploads/2016/04/Siaran-Pers-Paska-Konpres-Bonojegoro-Pelopori-Open-Government-di-Indonesia-INFID-Seknas-OGI.pdf>
- <http://eksposa.com/?p=1518>
- <http://www.merdeka.com/peristiwa/wakil-indonesia-di-ogp-bojonegoro-pelopor-pemerintahan-terbuka.html>
- <http://www.mediaindonesia.com/news/read/40481/bojonegoro-jadi-percontohan-pemda-terbuka/2016-04-15>
- <http://www.tokohindonesia.com/lintas-berita/artikel/1350037/bojonegoro-terpilih-sebagai-percontohan-ogi>
- <http://www.arah.com/article/2007/suyoto-bawa-bojonegoro-jadi-pelopor-open-government.html>
- <http://finansial.bisnis.com/read/20160415/9/538043/pemerintah-daerah-bojonegoro-terpilih-mewakili-open-government-partnership>
- <http://www.beritasatu.com/megapolitan/328074-lembagakan-partisipasi-publik-pemerintah-dan-masyarakat-sipil-luncurkan-kembali-ogi.html>
- <http://kabar24.bisnis.com/read/20160415/78/538208/bojonegoro-jadi-percontohan-open-government-partnership>
- <http://wartaekonomi.co.id/berita97028/bojonegoro-wakili-ri-ikuti-ajang-open-government-partnership.html>
- <http://www.bedanews.com/bojonegoro-teilih-sebagai-percontohan-pemerintah-daerah-terbuka-open-government-partnership>
- <http://suaraterkini.com/bojonegoro-terpilih-mewakili-indonesia-sebagai-percontohan-pemerintah-daerah-terbuka-di-dunia/>

- <http://www.zonalima.com/artikel/8177/Bojonegoro-Wakil-Indonesia-di-Ajang-Open-Government-Partnership/>
- <http://kebebasaninformasi.org/2015/12/03/ogi-buka-ruang-aspirasi-untuk-penyusunan-rencana-aksi-2016-2017/>
- <http://kebebasaninformasi.org/2014/11/14/bojonegoro-siap-terapkan-uu-kip/>
- <http://www.tribunnews.com/regional/2016/04/14/kabupaten-bojonegoro-wakili-indonesia-dalam-ajang-open-government-partnership>
- <http://br-online.co/bojonegoro-wakil-indonesia-di-ajang-open-government-partnership/>
- <http://www.harnas.co/2016/04/15/bojonegoro-jadi-percontohan>
- <http://www.harnas.co/2016/04/14/bojonegoro-jadi-percontohan-pemerintah-daerah-terbuka>
- <http://info-bojonegoro.com/bojonegoro-satu-satunya-daerah-raih-ogp-2016/>
- <http://blokbojonegoro.com/read/article/7/20160412/bojonegoro-juga-raih-open-government-partnership-2016.html>
- <http://www.jelasberita.com/2016/04/14/mewakili-indonesia-sebagai-daerah-percontohan-bojonegoro-disetarakan-dengan-madrid-dan-paris/>
- <http://www.koran-jakarta.com/bojonegoro-pelopor-open-government-di-indonesia/>
- <http://beritabojonegoro.com/read/4327-bojonegoro-masuk-open-government-partnership-2016.html>
- <http://surabayaonline.co/2016/04/15/bojonegoro-terpilih-jadi-pemerintahan-daerah-terbuka-tingkat-dunia-apa-rahasianya/>
- <http://www.updatepos.com/2016/04/wah-hebat-bojonegoro-terpilih-menjadi.html#sthash.7SqGLvaw.dpbs>
- <http://nasional.beritaprima.com/wow-bojonegoro-terpilih-jadi-pemda-terbuka-tingkat-dunia/>
- <http://sinarharapan.net/2016/04/open-city-bojonegoro-sejajar-dengan-paris-dan-madrid/>
- <http://www.freedominfo.org/2016/04/foi-notes-aid-transparency-ogp-tai-gambia-bahamas-india-open-data-us-uk-australia/>
- <http://austintexas.gov/blog/city-austin-chosen-join-international-open-government-partnership-pioneer-city>
- <http://demolessons.org/2016/04/14/bojonegoro-dapat-penghargaan-pemerintahan-daerah-terbuka-tingkat-dunia/>
- <http://ogp.gov.ro/societatea-civila/deschiderea-sesiunii-de-inscriere-in-cadrul-programului-pilot-al-ogp-guvernare-deschisa-la-nivel-local/>
- <https://stei.itb.ac.id/id/blog/2014/05/23/data4dev-pendeklarasian-pemerintahan-yang-terbuka/>
- <http://networkofcenters.net/news/ogp-asia-pacific-regional-conference>
- <http://cis-india.org/news/open-govt-partnership-asia-pacific-regional-conference-may-6-7-2014>
- <http://www.pressreleasepoint.com/ogp-asia-pacific-regional-conference>



LAPORAN

Semester 1

2016

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO